

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan ketersediaan bahan makanan atau pangan dimana setiap individu mampu memperolehnya sebagai kebutuhan dasar. Ketahanan pangan dapat tercipta jika individu mendapatkan kebutuhan pangan atau makanan yang bergizi dan memberikan manfaat untuk dirinya serta aman dikonsumsi. Indonesia sebagai negara agraris tentu memiliki banyak sumber daya alam yang dapat diolah menjadi suatu kebutuhan pokok masyarakat, namun seiring berjalannya waktu kondisi ketahanan pangan di Indonesia kian memburuk dikarenakan semakin berkurangnya lahan – lahan pertanian yang menjadi tempat kebutuhan pokok masyarakat di produksi akibat peralihan fungsi lahan pertanian yang semakin marak akhir – akhir ini. Ditambah lagi dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia sehingga tentu menuntut lebih banyak lagi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, sehingga diprediksi ketahanan pangan di Indonesia akan semakin memburuk. Tentu ini menjadi suatu kewajiban serta tugas yang berat bagi pemerintah untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia. Sangat diperlukan kebijakan – kebijakan yang efisien untuk mengatasinya dan perlu perencanaan yang matang setidaknya untuk mengurangi hingga dapat menghilangkan masalah ketahanan pangan ini dari tahun ke tahun.

Menggapai stabilitas harga bahan pangan di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang mudah. Harga bahan pangan yang fluktuatif seakan-akan menjadi tradisi rutin yang selalu terulang setiap tahunnya. Bukan hanya konsumen yang terkena imbasnya, namun juga para petani lokal hingga distributor pun akan ikut merugi. Fluktuasi harga pangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam pembentukan angka inflasi. Badan Pusat Statistik menggolongkan kenaikan harga bahan pangan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*). Dari sisi produksi, sesuai dengan karakteristik produk pertanian pada umumnya, beberapa penyebab terjadinya fluktuasi harga adalah karena ketidakpastian dalam produksi yang

diakibatkan oleh musim panen, gangguan alam serta pengaruh perdagangan pangan domestik dan global. Selain diakibatkan oleh faktor-faktor produksi, fluktuasi harga pangan juga dapat dipengaruhi oleh sistem distribusi pangan yang berlangsung untuk setiap komoditas pangan. Rantai pasok komoditas pangan yang berjalan secara efisien berperan penting dalam pembentukan harga yang adil bagi seluruh pelaku yang berperan di dalam rantai pasok komoditas pangan. Kondisi ini akan menguntungkan baik bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen. Namun sebaliknya, ketidakefisienan dalam rantai pasok yang antara lain disebabkan oleh rantai pasok yang terlalu panjang, atau adanya pihak dalam rantai pasok yang mempunyai kekuatan untuk menentukan harga akan menyebabkan kerugian baik bagi petani maupun bagi konsumen (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat petani/produsen dan di tingkat konsumen. Melalui kegiatan ini, gapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI) diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi dalam suatu rantai distribusi yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi disparitas harga antara produsen dan konsumen. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan dalam kegiatan ini digunakan untuk memperkuat permodalan untuk menyerap gabah yang diproduksi petani dengan harga minimal sama dengan harga pangan pokok (HPP) sehingga gapoktan dapat berperan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani terutama pada saat panen raya. Bantuan pemerintah juga digunakan untuk mendukung pengolahan pasca panen sehingga gapoktan dapat menyediakan beras berkualitas baik dengan harga yang wajar dan lebih terjangkau bagi masyarakat (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada

saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat. Pada sisi pemasaran, gapoktan difasilitasi untuk membentuk kemitraan dengan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan lembaga distribusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mekanisme pemasaran ini akan memperpendek rantai pasok komoditas pangan sehingga tercipta margin keuntungan yang lebih adil bagi seluruh pihak di dalam rantai pasok dan menjaga kepastian harga dan pasokan bagi produsen dan konsumen (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat tani. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah.

Pembangunan masyarakat mencakup aneka ragam kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses yang kompleks ini terdiri dari dua unsur pokok yaitu : (1) partisipasi masyarakat dalam usahanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengandalkan sedapat mungkin pada inisiatif mereka sendiri dan (2) penyediaan keperluan teknis dan pelayanan-pelayanan lain sebagai cara untuk memperkuat inisiatif, kemandirian, dan gotong royong yang membuat pembangunan menjadi lebih efektif (Slamet, 1994).

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat atau petani yaitu keikutsertaan masyarakat atau petani dalam suatu pengambilan keputusan terkait dalam pelaksanaan suatu program. Program Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat (PUPM) tidak akan berjalan lancar tanpa partisipasi petani (petani anggota gapoktan), sehingga dalam kegiatan PUPM partisipasi aktif dari petani anggota gapoktan sangat diperlukan. Partisipasi petani anggota gapoktan diperlukan pada tahap perencanaan yaitu pada saat pengambilan keputusan, penyampaian ide atau gagasan yang melibatkan petani petani anggota gapoktan pada saat rapat rutin gapoktan, partisipasi pada tahap pelaksanaan yaitu pada proses jual beli gabah antara petani dan gapoktan, pengolahan gabah menjadi beras melalui proses penggilingan, kemudian produksi dan pengemasan serta pemasaran beras ke Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan tersebut membutuhkan keikutsertaan petani anggota gapoktan. Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil yaitu pada saat petani anggota gapoktan mampu mendapatkan harga yang lebih baik pada proses jual beli gabah, sehingga mampu menaikkan pendapatannya, kemudian terpenuhinya kebutuhan pangan beras dengan harga yang relatif terjangkau. Sedangkan partisipasi pada tahap evaluasi yaitu keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam mengawasi kinerja program yang telah berjalan dan memberikan masukan atau saran terhadap program, sehingga petani anggota gapoktan mampu menilai dari pelaksanaan program tersebut.

Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan satu-satunya desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan PUPM tersebut memiliki sasaran, yaitu Gapoktan Mumpuni Jaya yang merupakan nama gapoktan di Desa Mancasan. Desa Mancasan merupakan satu-satunya desa yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, melalui Badan Ketahanan Pangan Sukoharjo karena dianggap mampu dan memenuhi syarat dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang merupakan program Kementrian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) pada tahun 2016 lalu. Syarat dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yaitu gapoktan yang telah memiliki *rice milling unit* (unit penggiling padi) secara mandiri, diutamakan memiliki mesin pengering (*dryer*), dan mampu menyediakan gudang

penyimpanan pangan dan aset pendukung lainnya. Selain merupakan desa yang gapoktannya ditunjuk mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Desa Mancasan juga merupakan desa dengan areal yang terluas se-Kecamatan Baki dengan hampir sebagian penduduknya bekerja disektor pertanian. Hasil produksi padinya cukup melimpah yaitu 2.320 ton pada tahun 2015, sehingga termasuk desa pemasok dalam penyediaan pangan berupa beras di Kabupaten Sukoharjo. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Luas panen dan produksi padi sawah menurut desa Tahun 2016

No	Nama Desa	Padi Sawah	
		Ha	Ton
1	Ngrombo	160	1.213
2	Mancasan	305	2.320
3	Gedongan	227	1.717
4	Jetis	171	1.291
5	Bentakan	205	1.559
6	Kudu	336	2.574
7	Kadilangu	130	993
8	Bakipandeyan	144	1.096
9	Menuran	315	2.382
10	Duwet	188	1.422
11	Siwal	259	2.039
12	Waru	205	1.611
13	Gentan	58	442
14	Purbayan	87	213
Jumlah		2.790	20.872

Sumber : BPS Kecamatan Baki dalam angka 2016

Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan kegiatan bersama yang memerlukan partisipasi aktif dari semua petani anggota gapoktan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Beberapa kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Mumpuni Jaya Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yaitu Kelompok Tani Mumpuni I, Mumpuni II, Mumpuni III dan Mumpuni IV. Program PUPM sendiri masih terbilang baru di Desa Mancasan karena baru berjalan selama satu tahun, dan sudah berjalan selama tiga musim tanam. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana partisipasi

petani anggota gapoktan Desa Mancasan yang telah melaksanakan program selama tiga musim tanam, mengingat program tersebut merupakan program yang masih baru dan belum begitu dikenal oleh petani anggota gapoktan. Permasalahan dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sendiri sudah terlihat dari hasil penjualan beras di Toko Tani Indonesia (TTI), gapoktan tidak mendapatkan keuntungan bahkan terkadang merugi. Salah satu penyebab hal tersebut diantaranya adalah kurangnya dukungan dari petani anggota gapoktan, sehingga penelitian terkait partisipasi ini diperlukan untuk meneliti bagaimana karakteristik petani anggota gapoktan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

Partisipasi petani dalam pelaksanaan program pertanian sangat diperlukan. Adanya partisipasi dari petani, suatu program diharapkan mampu terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan program yang dilaksanakan untuk petani petani anggota gapoktan, karena gapoktan sendiri merupakan sasaran dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Program ini sendiri dilaksanakan di beberapa kabupaten se-Indonesia dengan dukungan pemerintah sebagai fasilitator. Program tersebut merupakan program yang terbilang baru pada tahun 2016, sejauh ini Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan program tersebut selama tiga musim tanam, penelitian ini ingin melihat sejauh mana partisipasi petani anggota gapoktan setelah melihat permasalahan dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yaitu gapoktan tidak mendapatkan keuntungan bahkan terkadang merugi. Salah satu penyebab hal tersebut diantaranya adalah kurangnya dukungan dari petani anggota gapoktan. Elizabeth (2008), menyatakan bahwa partisipatif dalam proses pembangunan diantaranya melalui berbagai program kebijakan pembangunan pertanian dimaksudkan agar dapat menjembatani antara aspirasi dan

kebutuhan masyarakat petani di pedesaan. Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran publik bahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan pertanian di pedesaan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan keterlibatan masyarakat petani dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut, dari awal hingga akhir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Dari permasalahan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana karakteristik petani anggota gapoktan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), karena kurangnya partisipasi dari petani anggota gapoktan sendiri menjadikan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tidak dapat berjalan dengan baik, dan sebagai imbasnya pembangunan pertanian menjadi terhambat.

Partisipasi petani berhubungan dengan berbagai faktor sosial yang akan menentukan tingkat partisipasinya sehingga ketika faktor-faktor tersebut ditemukan dalam lokasi penelitian, maka hal itu dapat dijadikan acuan dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi, dan peran pemerintah. Partisipasi petani tersebut meliputi dalam beberapa tahap diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan suatu kegiatan atau pola pembangunan pertanian yang menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Selain pemerintah sebagai fasilitator, partisipasi petani anggota gapoktan sangat penting dalam pelaksanaan program ini, untuk itu peneliti ingin melihat karakteristik faktor-faktor yang berpengaruh dalam keinginan petani anggota gapoktan untuk berpartisipasi dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani anggota gapoktan dalam kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaiman partisipasi petani anggota gapoktan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi dalam kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana pengaruh faktor-faktor seperti pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi dan peran pemerintah terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji karakteristik petani anggota gapoktan yang meliputi faktor-faktor yang berpengaruh seperti pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi, dan peran pemerintah dalam kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo
2. Mengkaji partisipasi petani anggota gapoktan dalam kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo
3. Mengkaji pengaruh karakteristik petani anggota gapoktan yang meliputi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam kegiatan program Pengembangan

Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus dipilih sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
2. Bagi pengambil kebijakan dan lembaga terkait seperti BKP (Badan Ketahanan Pangan) Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi informasi untuk meneliti lebih lanjut dalam kajian yang sama.
4. Bagi petani petani anggota gapoktan, penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

II. LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa acuan yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang Dilakukan

Peneliti	Judul Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian ini
Nur Arifah (2002)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani dalam Program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penarikan sample menggunakan <i>Startified Random Sampling</i> (pengambilan sample acak distratifikasi) - Metode analisis data menggunakan uji <i>Chi Square</i> - Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak signifikan antara faktor internal seperti tingkat pendidikan, luas penguasaan lahan dengan tingkat partisipasi mengikuti Program SLHPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penarikan sample menggunakan <i>proportional random sampling</i> - Metode Analisis data menggunakan regresi linier berganda - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak signifikan faktor keaktifan anggota, manajemen kelompok dan peran pemerintah dengan partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program PUPM
Heny Rozaqi (2009)	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif - Meneliti faktor pembentuk partisipasi berupa kemauan, kemampuan dan kesempatan - Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PNPM Mandiri pada tahap perencanaan dan pelaksanaan tergolong sedang, sedangkan untuk tahap pemanfaatan hasil tergolong tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan adalah <i>explanatory</i> - Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program PUPM pada tahap perencanaan dan pemanfaatan hasil adalah cukup, evaluasi adalah rendah dan pelaksanaan adalah sangat rendah

Peneliti	Judul Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian ini
Ayuningtyas Nilasari (2010)	Partisipasi Wanita Tani dalam Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> – Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif – Metode Penarikan sample menggunakan teknik bola salju atau <i>snowball sampling</i> – Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi wanita tani baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil terbilang cukup tinggi, namun pada pemantauan dan evaluasi tergolong rendah 	<ul style="list-style-type: none"> – Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif – Metode penarikan sample menggunakan <i>proportional random sampling</i> – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program PUPM pada tahap perencanaan dan pemanfaatan hasil adalah cukup, evaluasi adalah rendah dan pelaksanaan adalah sangat rendah
Rahmad Sugiyanto (2011)	Partisipasi Petani Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Kegiatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten	<ul style="list-style-type: none"> – Metode Analisis data yang digunakan adalah uji korelasi <i>rank spearman</i> – Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi petani berupa umur, luas lahan, pendapatan dan pendidikan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi petani pada tahap perencanaan tergolong rendah, pada tahap pelaksanaan tergolong tinggi dan pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang 	<ul style="list-style-type: none"> – Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program PUPM berupa keaktifan anggota, manajemen kelompok dan peran pemerintah tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program PUPM.

Sumber : data primer 2017

Theodorson dalam Mardikanto (1994), mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukan bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya,

diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Penelitian yang terkait membahas mengenai tingkat partisipasi petani dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi yaitu diantara penelitian dari Heny Rozaqi (2009) dan Ayuningtyas Nila Sari (2010). Penelitian tersebut secara garis besar menggambarkan seberapa besar tingkat partisipasi dari masyarakat atau petani dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Heny Rozaqi (2009), mengenai Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen menggunakan metode deskriptif, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap PNPM Mandiri pada tahap perencanaan dan pelaksanaan tergolong sedang, sedangkan untuk tahap pemanfaatan hasil tergolong tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Nilasari (2010) mengenai Partisipasi Wanita Tani dalam Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi wanita tani baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil terbilang cukup tinggi, namun pada pemantauan dan evaluasi tergolong rendah.

Namun dalam penelitian tersebut belum menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi yang berada pada personal karena penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif dan kualitatif, sedangkan penelitian ini lebih cenderung menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mengacu pada teori dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sehingga peneliti menggunakan penelitian Nur Arifah (2002) dan Rahmad Sugiyanto (2011) sebagai referensi untuk meneliti faktor-faktor pengaruh partisipasi. Penelitian tersebut secara garis besar menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh maupun yang berhubungan dengan diri seseorang dalam berpartisipasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Arifah (2002), mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani dalam Program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis data *Chi Square*, dari penelitiannya tersebut menunjukkan hasil bahwa tidak signifikan antara faktor-faktor internal seperti tingkat pendidikan, luas penguasaan lahan dengan tingkat partisipasi mengikuti Program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Sugiyanto (2011) mengenai Partisipasi Petani Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis data yang digunakan yaitu korelasi *rank spearman*, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi petani berupa umur, luas lahan, pendapatan dan pendidikan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi petani pada tahap perencanaan tergolong rendah, pada tahap pelaksanaan tergolong tinggi dan pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang.

Dari uraian mengenai referensi penelitian terdahulu, penelitian ini ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program PUPM seperti pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi dan peran pemerintah dan bagaimana tingkat signifikasinya sehingga peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survey yang menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda yang menggunakan beberapa uji seperti uji validitas, uji reabilitas, dan uji asumsi klasik dan uji kesesuaian untuk melihat seberapa besar tingkat signifikan faktor-faktor tersebut terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

B. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat secara umum. Pembangunan pertanian merupakan produk masyarakat dan memberikan sumbangan kepadanya. Serta menjamin bahwa pembangunan menyeluruh itu (*overall development*) akan benar-benar bersifat umum, dan mencakup penduduk yang hidup dari bertani yang jumlahnya besar dan untuk tahun-tahun mendatang ini diberbagai negara akan terus hidup dari bertani. Pembangunan akan terlaksana, apabila pengetahuan dan ketrampilan petani terus ditingkatkan dan berubah. Petani terus menerus menerima metode baru, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mengembangkan sikap baru yang berbeda terhadap pertanian, terhadap alam sekitar dan terhadap mereka sendiri (Mosher, 1991).

Menurut Mardikanto (1993), salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan pertanian adalah tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat (petani) yang hidup di pedesaan. Adanya kenaikan pendapatan tersebut, jumlah dan ragam serta mutu konsumsi masyarakat terus bertambah, baik konsumsi bahan pokok (khususnya tanaman pangan) maupun konsumsi terhadap barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non pertanian.

Pembangunan pertanian akan berhasil bila ada partisipasi dari petani dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Partisipasi melalui keikutsertaan petani dapat menjadi cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan program penyuluhan, karena mereka memiliki informasi yang penting untuk merencanakan program termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta struktur sosial dalam masyarakat (Van den Ban dan Hawkins, 1999).

Didalam proses pembangunan pertanian, perbaikan kualitas hidup yang dicita-citakan itu diupayakan melalui kegiatan peningkatan produktivitas usaha tani, yakni melalui semakin besarnya turutannya

campur tangan manusia (petani) selama proses produksi itu berlangsung. Pembangunan pertanian menuntut adanya perubahan perilaku petani yang mutlak diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas usaha tani, dan peningkatan pendapatan demi perbaikan kualitas hidupnya sendiri dan masyarakatnya. Pembangunan pertanian adalah salah satu subsistem pembangunan ekonomi nasional dalam arti yang lebih luas, oleh sebab itu upaya pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembangunan nasional bidang ekonomi. Artinya, pembangunan sektor-sektor lain di luar sektor pertanian yang memiliki pautan (*linkages*), baik pautan ke depan dan pautan kebelakang, akan sangat diperlukan dan sekaligus terus terpacu oleh semakin digiatkannya pembangunan pertanian (Mardikanto, 2007).

Zakaria (2009) menyebutkan, kesejahteraan petani tidak akan terwujud tanpa adanya pembangunan (pembangunan pertanian). Pembangunan merupakan suatu proses *multidimensional* yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan kelembagaan nasional, termasuk pula akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan absolut dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada masa sekarang, pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan agribisnis, yang pada hakekatnya menekankan kepada tiga hal, yaitu (1) pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan bisnis, dengan demikian aspek usaha dan pendapatan menjadi dasar pertimbangan utama, (2) pendekatan pertanian bukan semata pembangunan sektoral, namun juga terkait dengan sektor lain (*lintas/inter-sektoral*), (3) pembangunan pertanian bukan pengembangan komoditas secara parsial, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya pedesaan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan petani.

2. Ketahanan Pangan

Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu “ketersediaan pangan” dan “akseibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional atau di tingkat regional, tetapi akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Aspek distribusi bahan pangan sampai pelosok rumah tangga pedesaan yang tentunya mencakup fungsi tempat, ruang, dan waktu juga tidak kalah pentingnya dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan (Arifin, 2001).

Menurut Nurmala *et al* (2012), Kebijakan Ketahanan Pangan pada aspek distribusi, merupakan kebijakan ketahanan pangan yang diarahkan untuk : (a) mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk didalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien, (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antardaerah, dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Di Indonesia dalam tataran kebijakan ekonomi makro, sering kali pembangunan ketahanan pangan direduksi sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan beras, karena beras telah dijadikan komoditas strategis secara ekonomi dan politik. Kebijakan pangan pada umumnya terkonsentrasi pada upaya penyediaan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat sepanjang waktu. Persepsi ini tidak hanya dianut oleh unsur-unsur pemerintah saja, tetapi juga dipahami oleh komponen bangsa lainnya, seperti anggota legislatif, wakil-wakil organisasi kemasyarakatan, dan pengaruh media massa. Lebih jauh lagi

beras mempunyai kedudukan yang teramat vital dan fatal. Vital karena beras adalah kebutuhan dasar manusia Indonesia dan fatal apabila penyediaannya defisit lantas dapat dijadikan alat oleh kekuatan politik, baik yang sedang berkuasa maupun yang di luar kekuasaan saat ini. Penilaian tersebut masih sangat relevan sampai kini. Oleh karena itu, beras selalu ditempatkan sebagai komoditas utama dalam penyusunan konsep dan implementasi kebijakan perekonomian Indonesia (Kasryno dan Pasandaran dalam Suryana, 2008).

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan (Purwaningsih, 2008).

Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu 215 juta orang, masalah pangan selalu merupakan masalah yang sensitif. Sering terjadi gejolak politik karena dipicu oleh kelangkaan dan naiknya harga pangan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pangan bukan sekedar komoditas ekonomi tetapi juga menjadi komoditas politik yang memiliki dimensi sosial yang luas (Sambutan Menko Perekonomian, 2005). Ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional berdasarkan pada pemahaman atas peran strategis dalam pembangunan nasional. Tiga aspek peran strategis tersebut antara lain adalah : 1) akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia, 2) peranan penting pangan bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan 3) ketahanan pangan merupakan salah satu

pilar utama yang menopang ketahanan pangan ekonomi dan ketahanan nasional (Ariani, 2007).

3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUPM merupakan salah satu sub kegiatan prioritas. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pada Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan Program yang dijalankan oleh Badan Ketahanan Pangan bidang distribusi pangan terkait tugas dan wewenang bidang tersebut adalah sebagai fasilitator yang menjembatani antara Pemerintah dan masyarakat dalam hal pemasaran atau pemerataan pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu. Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat. Tujuan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tahun 2016, adalah :

- a. Menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis;
- b. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis
- c. Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan wajar (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Kegiatan PUPM dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu melibatkan instansi di tingkat pusat dan daerah, pendamping, gapoktan, serta Toko Tani Indonesia (TTI). Di tingkat pusat, pelaksanaan kegiatan

PUPM dilaksanakan oleh tim pokja pusat. Di tingkat daerah, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota dibentuk tim pembina provinsi dan tim teknis kabupaten/kota dan di tingkat gapoktan selaku pengelola pemanfaatan dana bantuan pemerintah harus membentuk unit pelaksana kegiatan PUPM (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Pelaksanaan kegiatan PUPM dilaksanakan melalui dukungan dana APBN. Dana yang dialokasikan tersebut disalurkan kepada gapoktan dalam bentuk dana bantuan pemerintah untuk melakukan pembelian pangan pokok dan strategis dari petani/mitra dan selanjutnya memasok pangan pokok dan strategis tersebut kepada TTI untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang layak. Dalam hal ini TTI yang dimaksud adalah pedagang yang menjadi mitra gapoktan yang bergerak di bidang pangan yang terkait melalui kerjasama antara kedua belah pihak (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Sasaran dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) adalah gapoktan, sehingga adapun kriteria yang wajib dibutuhkan gapoktan dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yaitu gapoktan harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM
- b. Bersedia dan sanggup melakukan identifikasi CPCL untuk pedagang Toko Tani Indonesia;
- c. Melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada petani/mitra dengan harga yang menguntungkan bagi petani;
- d. Melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada pedagang TTI;

- e. Membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada PPK dan BKP provinsi melalui BKP kabupaten/kota (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Program PUPM sendiri memiliki dana bantuan sosial dari Pemerintah sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- a. Dana bantuan minimal sebesar 70% digunakan untuk membeli bahan pangan pokok (berupa gabah) yang siap digiling dan strategis dari petani anggota gapoktan, mitra, atau petani lainnya guna memasok/menyalurkan kepada Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai wadah pendistribusian kepada konsumen. Dana bantuan tersebut digunakan dengan tujuan agar pasokan beras di Toko Tani Indonesia selalu ada untuk dijual kepada konsumen. Tujuan Gapoktan membeli bahan pokok kepada petani anggota gapoktan maupun petani menandakan ada keikutsertaan (partisipasi) petani petani anggota gapoktan dalam tahap pelaksanaan Program karena telah membantu Gapoktan dalam proses produksi beras untuk didistribusikan di Toko Tani Indonesia.
- b. Dana bantuan maksimal sebesar 30% digunakan untuk biaya transportasi, sortasi, kemasan dan biaya operasional lain. Dana tersebut dikelola gapoktan sebaik mungkin untuk mengelola produksi beras untuk didistribusikan di Toko Tani Indonesia.
- c. Apabila Gapoktan hanya memasok untuk 2 (dua) Toko Tani Indonesia (TTI) maka 1 (satu) Toko Tani Indonesia (TTI) dipasok maksimal sebesar 60%. Jika Gapoktan memasok lebih dari 2 (dua) Toko Tani Indonesia maka 1 (satu) Toko Tani Indonesia dipasok maksimal 40% (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Monitoring dan evaluasi program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari pelaksanaan kegiatan PUPM dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan. Monitoring dan

evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pengawasan merupakan proses dan semua aktivitas yang dilakukan oleh tim pembina pusat/provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota untuk memastikan bahwa segala kegiatan PUPM yang terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

4. Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

a. Petani

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan petani di Indonesia adalah *"peasant"* yang memiliki karakteristik khas. *Peasant* adalah petani kecil yang lahan pertaniannya sempit dengan hasil usahatani yang sebagian besar untuk keperluan keluarga, bersifat tradisional. Sedangkan, *farmer* adalah petani pengusaha yang menjalankan usaha tani secara perusahaan, dan biasanya memiliki lahan luas karena hasil pertaniannya untuk konsumsi pasar (Warsana, 2008).

"Farmer as a social creature life is not free from the influence of others. They are individuals who grow and develop, not only influenced by biological factors but also more precisely determined by the social environment" (Sumardjo *et al*, 2015)

Sumardjo *et al* (2015), mendefinisikan petani sebagai makhluk sosial yang hidupnya tidak lepas dari pengaruh orang lain. Mereka adalah individu yang tumbuh dan berkembang, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis tapi juga lebih tepatnya ditentukan oleh lingkungan sosial.

Kapasitas atau kemampuan petani merupakan salah satu prasyarat bagi petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan bagi masyarakat petani

dianggap penting karena beberapa alasan. Pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Kedua, organisasi masyarakat memberikan kelanggengan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat. Ketiga, untuk menyiapkan masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka (Bunch, 1991).

Partisipasi petani dalam lembaga-lembaga lokal merupakan manifestasi keberdayaan masyarakat. Petani yang berdaya, menurut Susetiawan (2000), adalah petani yang secara politik dapat mengartikulasikan (menyampaikan perwujudan) kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan proses tawar-menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat mengelola mengatur komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara budaya diakui eksistensinya.

Kesejahteraan petani merupakan tantangan pemerintah daerah di era otonomi. Otonomi daerah hendaknya mendekatkan pemerintah kepada petani, menunjukkan kepedulian kepada petani dan pertanian, mempercepat pemecahan masalah petani dan pertanian. Dengan otonomi daerah pemda memiliki posisi strategis dengan keleluasaan untuk menelorkan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang semakin fokus, bisa menemukan komoditas unggulan sesuai potensi lokal, dan menemukuknali beragam upaya inovasi nilai tambah produk pertanian. Dengan otonomi, idealnya permasalahan yang dihadapi petani dan pertanian dengan cepat diketahui dan diberikan solusi yang memadai (Sunarti dan Khomsan, 2006).

Menurut Soekartawi (1988), salah satu ciri dari pertanian di Indonesia adalah pemilikan lahan pertanian yang sempit, sehingga dengan demikian pengusaha pertanian di Indonesia dicirikan oleh banyaknya rumah tangga tani yang berusahatani dalam skala kecil. Petani kecil di Indonesia, menurut pengertian BPLPP (dalam

Soekartawi dan kawan-kawan 1986) adalah dicirikan oleh karakteristik sebagai berikut :

- 1) Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari 240 kg beras perkapita per tahun
- 2) Petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 ha lahan sawah di Jawa atau 0,50 ha di luar Jawa. Bila petani tersebut juga mempunyai lahan tegal, maka luasnya 0,50 ha di Jawa atau 1,00 ha di luar Jawa
- 3) Petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas
- 4) Petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang dinamik

b. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa. Fungsi dan peran gapoktan adalah memfasilitasi pemecahan kendala/masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan. Hal ini berimplikasi bahwa pembentukan gapoktan akan diikuti dengan pembentukan divisi-divisi/unit-unit usaha berdasarkan adanya kendala atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya. Dengan demikian pembentukan divisi/unit usaha dalam gapoktan bersifat kondisional dan tergantung pada kendala yang dihadapi petani dari setiap lokasi (Hermanto dan Subowo, 2006).

Gapoktan pada hakekatnya bukanlah lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang dapat dipilih di samping lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam aktivitas ekonomi secara langsung. Pengembangan gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan

juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan dengan pedagang saprotan maupun pedagang hasil-hasil pertanian (Syahyuti, 2007).

Tujuan utama pembentukan dan penguatan gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan,2006). Disini terlihat bahwa, pembentukan gapoktan bisa kepada kepentingan “atas”, yaitu sebagai “kendaraan” untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan. Pembentukan gapoktan, meskipun nanti dapat saja menjadi lembaga yang mewakili kebutuhan petani, namun awal terbentuknya bukan dari kebutuhan internal secara mendasar. Ini merupakan gejala yang berulang sebagaimana dulu sering terjadi, yaitu hanya mementingkan kuantitas belaka, namun tidak berakar di masyarakat setempat. Target akhir adalah aktifnya 66.000 gapoktan hingga tahun 2009. Ini artinya, seluruh desa di Indonesia akan memiliki sebuah gapoktan (Warsana, 2009).

“Farmers’ organizations have been suggested as a key tool to improve the living conditions of the resource-poor farmers in developing countries. There is a positive effect on small-scale farmers’ income from being member in a farmers’ organization (Bachke, 2009 in Tolno et al, 2015). And membership to such organizations is considered to increase the level of agricultural production and yield economic benefit to farmers as well as promote their general welfare” (Oyeyinka et al., 2009; Mwaura, 2014 in Tolno et al, 2015)

Bachke (2009) dalam Tolno *et al* (2015), menjelaskan bahwa Organisasi petani telah disarankan sebagai alat kunci untuk memperbaiki kondisi kehidupan petani miskin di negara-negara berkembang. Ada sebuah pengaruh positif pada pendapatan petani skala kecil dari menjadi anggota dalam organisasi petani. Oyeyinka *et al* (2009) dan Mwaura (2014) dalam Tolno *et al* (2015) berpendapat bahwa keanggotaan organisasi semacam itu dianggap dapat

meningkatkan tingkat produksi hasil pertanian dan manfaat ekonomi bagi petani serta meningkatkan kesejahteraan umum mereka.

Untuk meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah komersial, kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gapoktan. Disini terlihat, bahwa pengembangan gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari lembaga petani yang sudah berjalan baik, yaitu kelompok-kelompok tani. Dengan kata lain, adalah tidak tepat langsung membuat gapoktan pada wilayah yang secara nyata kelompok-kelompok taninya tidak berjalan baik. Ketentuan ini sesuai dengan pola pengembangan kelembagaan secara umum, karena gapoktan diposisikan sebagai institusi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga fungsional di bawahnya, yaitu para kelompok tani (Syahyuti, 2007).

Kelompok tani berfungsi menjadi titik penting untuk menjalankan dan menterjemahkan konsep hak petani kedalam kebijakan, strategi dan program yang layak dalam satu kesatuan utuh dan sebagai wadah transformasi dan pengembangan ke dalam langkah operasional. Kelompok tani penting sebagai wadah pembinaan petani yang tergabung didalamnya, sehingga dapat memperlancar pembangunan pertanian (Mosher dalam Dwijandi, 1994).

Sumber daya manusia dalam kelompok tani tersebut akan terorganisir menjadi pengurus dan anggota dalam satu manajemen untuk mengelola sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian, dan input usaha tani yang lain, termasuk jenis teknologi yang akan digunakan untuk berusaha tani, pasca panen dan pemasaran hasil produksi. Dengan demikian, fungsi kelompok tani sebagai *agent of change* di tingkat petani. Oleh karena itu petani sebaiknya membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok tani, karena keanggotaan dalam suatu kelompok akan lebih memudahkan mendapat akses informasi, kredit, teknologi dan kemudahan dari suatu kebijakan pemerintah (Kutsiyah *et al*, 2009).

c. Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan, terutama kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh istilah partisipasi (*participation*), yang berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa, “*participation in some sense is a requirement for successful development efforts*” yang artinya partisipasi dalam beberapa pengertian adalah sebuah syarat untuk upaya keberhasilan pembangunan. Partisipasi menjadi salah satu syarat yang menentukan bahwa pembangunan dapat dianggap berhasil.

Cohen dan Uphoff (1977) mendefinisikan partisipasi khususnya partisipasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

“With regard to rural development, we saw “participation” including people’s involvement in decision-making processes about what would be done and how; their involvement in implementing Programs and decisions by contributing various resources or cooperating in specific organizations or activities; their sharing in the benefits of development Programs; and/or their involvement in efforts to evaluate such Programs. Taken together, these four kinds of involvement appeared to encompass most of what would generally be referred to as “participation” in rural development activities.” (Cohen dan Uphoff, 1977)

Berkenaan dengan pembangunan pedesaan, Cohen dan Uphoff (1977) melihat bahwa, partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana keputusan tersebut dilakukan; keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program dan keputusan dengan menyumbangkan berbagai sumber daya atau kerja dalam organisasi atau kegiatan yang lebih spesifik; mereka berbagi manfaat dalam program pembangunan; keterlibatan mereka dalam upaya untuk mengevaluasi program. Secara keseluruhan, keempat jenis keterlibatan mencakup sebagian besar yang biasa disebut dengan partisipasi dalam kegiatan pembangunan pedesaan.

Istilah partisipasi sering diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi politik dan sosial, reformasi sosial atau bahkan yang disebut revolusi rakyat. Penggunaan istilah tersebut begitu beraneka ragam yang sebenarnya bukan menjelaskan arti yang sebenarnya dari partisipasi, tetapi hal-hal yang berkaitan dengannya (Slamet, 1994).

Theodorson dalam Mardikanto (1994), mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukan bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut (Diana Conyers, 1954; dalam Suparjan dan Suyatno 2003), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa diibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek swadaya di negara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga, partisipasi menjadi *urgent* karena timbul anggapan

bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Dalam *konteks* ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *mancentered development*, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

“Participation is a process in which stakeholders influence policy formulation, investment choices and management decisions affecting their communities, and they establish the necessary sense of ownership” (Yercan, 2003 in Khalkheili and Zamani, 2008).

Yercan (2003) dalam Khalkheili and Zamani (2008) menyatakan bahwa, partisipasi adalah proses di mana pemangku kepentingan memengaruhi perumusan kebijakan, pilihan investasi dan manajemen keputusan yang mempengaruhi masyarakat mereka, dan mereka menetapkan rasa kepemilikan yang diperlukan.

“Farmers’ participation is an important factor for sustainable agriculture in rural area. Farmers’ participation issues are the areas of concern at national and local level (Subedi, 2008). Without participation, there are obviously no partnerships, no developments, and no Program (Aref et al.,2010). Therefore, a lack of participation in the decision to implement an agricultural policy can lead to failure in the agricultural development. In this study participation is used with the involvement of farmers in decision making with the collaboration and interaction with agricultural organizations” (Aref, 2011).

Menurut Aref (2011) yang mengutip pendapat dari Subedi (2008) dan Aref *et al* (2010) mengemukakan bahwa, partisipasi petani menjadi faktor penting untuk keberlanjutan pertanian di area pedesaan. Persoalan partisipasi petani diberbagai daerah menjadi perhatian tingkat nasional maupun tingkat daerah. Tanpa partisipasi tentunya tidak ada perkumpulan, tidak ada pembangunan dan tidak ada program. Oleh karena itu, kurangnya partisipasi dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan kebijakan pertanian dapat dengan

mudah menjadi kegagalan dalam pembangunan pertanian. Dalam mempelajari ini, partisipasi digunakan dengan melibatkan petani dalam membuat keputusan dengan bekerjasama dan berinteraksi dengan organisasi pertanian.

“Farid et al.,(2009) defines participation as playing a role or taking part in an activity usually with others. Participation also refers to involvement of individuals and groups in development processes with the aim of ensuring self-reliance and better standard of living (Nxumalo and Oladele, 2013). The important relationship between farmer’s participation in agricultural projects on one hand, and economic development and poverty alleviation on the other hand, cannot be over emphasized. According to Nxumalo and Oladele (2013), without participation there would be no program and no development. Farmer’s participation in agricultural projects can either be nominal, consultative, action-oriented or collegial” (Etwire et al, 2013).

Etwire et al (2013) yang mengutip pendapat dari Farid et al (2009) dan Nxumalo and Oladele (2013) menyatakan bahwa, partisipasi seperti memainkan peran atau mengambil bagian dalam suatu aktivitas biasanya dengan orang lain. Partisipasi juga mengacu pada keterlibatan individu dan kelompok dalam proses pembangunan dengan tujuan untuk memastikan kemandirian dan standar kehidupan yang lebih baik (Nxumalo dan Oladele, 2013). Hubungan penting antara partisipasi petani dalam pembangunan pertanian, satu sisi dan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di sisi lain, tidak dapat terlalu ditekankan. Menurut Nxumalo dan Oladele (2013), tanpa partisipasi tidak akan ada program dan tidak ada pembangunan. Partisipasi petani dalam pembangunan pertanian bisa bersifat nominal, konsultatif, berorientasi pada tindakan atau kolejal.

“Poor participation of farmers has been adduced to be partly responsible for the poor performance and failures of farmer groups. An awareness of the level of participation of members of farmer groups will provide useful insight for extension agencies and policy makers in strengthening existing groups. Knowledge of the socioeconomic characteristics of farmers which affect their levels of

participation in group activities will also provide a focus around which stakeholders can work to bring about optimal participation of farmers in group activities” (Omotheso *et al* 2016).

Omotheso *et al* (2016) menjelaskan bahwa, partisipasi petani yang kurang baik telah dikemukakan menjadi bagian tanggung jawab atas buruknya kinerja dan kegagalan kelompok tani. Kesadaran akan tingkat partisipasi anggota kelompok tani akan memberi pengertian yang bermanfaat untuk lembaga penyuluhan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kelompok yang ada. Pengetahuan tentang karakteristik sosio-ekonomi petani yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan kelompok juga akan memberikan fokus di sekitar pemangku kepentingan agar dapat bekerja untuk mewujudkan partisipasi optimal petani dalam kegiatan kelompok.

5. Faktor yang Mempengaruhi Karakteristik Petani anggota gapoktan

a. Tingkat Pendidikan Non Formal

Menurut Suhardiyono (1992), penyuluhan merupakan pendidikan nonformal bagi petani beserta keluarganya dimana kegiatan dalam ahli pengetahuan dan ketrampilan dari penyuluh lapangan kepada petani dan keluarganya berlangsung melalui proses belajar mengajar. Beberapa ahli penyuluhan menyatakan bahwa sasaran penyuluhan yang utama adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan praktis bagi masyarakat petani di pedesaan dan kehidupan pertaniannya, melalui pelaksanaan penelitian ilmiah dan percobaan di lapang yang diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaan suatu jenis kegiatan serta pertukaran informasi dan pengalaman diantara petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Besides greatly influencing farm productivity (per acre output), farmer education also determines farm income in the sense that a relatively more educated farmer is more equipped and updated with ever changing information on market prices, marketing or distribution channels,

weather and storage arrangements. etc “
(Panda, 2014).

Menurut Panda (2014), selain sangat mempengaruhi produktivitas pertanian (output per hektar), pendidikan petani juga menentukan pendapatan petani dalam arti bahwa petani yang relatif terdidik lebih dilengkapi dan diperbarui dengan informasi mengenai harga pasar, pemasaran atau distribusi yang terus berubah, saluran, pengaturan cuaca dan penyimpanan, dan lain-lain.

Menurut Setiana (2005), penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan, dengan demikian penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu pendidikan yang bersifat non formal di luar sistem sekolah yang biasa. Fungsi penyuluhan adalah untuk menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang yang menjadi kebutuhan para petani. Fungsi penyuluhan juga dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuai program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh petani, sehingga program-program masyarakat yang disusun dengan baik akan berhasil dan masyarakat berpartisipasi di dalam program tersebut.

b. Tingkat Pendapatan

Menurut Sukirno dalam Lumintang (2013), pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Beliau menambahkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada

akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.

Menurut Soekartawi (1988), petani dengan tingkat pendapatan tinggi akan lebih mudah melakukan sesuatu yang diinginkan sehingga akan lebih aktif dalam berpartisipasi dibandingkan dengan petani yang berpendapatan rendah. Sedangkan petani yang berpendapatan rendah akan cenderung pasif.

Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa faktor luar yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi adalah tingkat kemampuan ekonomi seseorang yang secara ekonomi mampu dengan kata lain tingkat pendapatan tinggi, akan lebih mudah menyediakan modal untuk berpartisipasi.

c. Keaktifan Anggota

Peran kelompok tani sangat strategis dalam pembangunan pertanian Suwandari *et al.* (2005), menyatakan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani yang berkelompok memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak berkelompok. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani secara berkelompok berperan cukup besar dalam mengembangkan skala usaha yang lebih ekonomis dan efisien. Aktifnya petani dalam keanggotaan kelompok tani akan meningkatkan motivasi untuk memproduksi lebih baik, bertukar informasi, dan dorongan penguasaan penerapan teknologi pertanian.

Partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok tani terbagi berdasarkan 5 (lima) indikator, yaitu: kehadiran dalam penyusunan program, keaktifan memberi masukan atau pendapat dalam penyusunan program, keaktifan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok, keaktifan evaluasi program dalam kelompok dan keaktifan dalam memberi masukan atau pendapat dalam evaluasi (Maleba *et al.*, 2015).

d. Luas Penguasaan Lahan

Menurut Maleba *et al* (2015), luas lahan yang diusahakan petani akan mempengaruhi besarnya pendapatan petani itu sendiri. Apabila semakin besar lahan yang diusahakan oleh petani maka semakin besar pula jumlah produksi dan jumlah produksi pendapatan yang akan dihasilkan. Supriyati *et al* (2004) menambahkan, lahan merupakan asset utama bagi masyarakat pedesaan dan pemilikan lahan akan menentukan status sosial pemilikinya, semakin luas lahan yang dimiliki semakin tinggi status sosialnya sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang.

e. Manajemen Kelompok

Griffin (2002) menjelaskan bahwa, proses manajemen melibatkan empat aktivitas dasar yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong (Mardikanto, 1993).

Herbert Hicks dan Ray Gullet (1987) menyatakan bahwa, kepemimpinan merupakan bagian dari manajemen, karena pimpinan merupakan suatu tingkatan dalam manajemen. Para manajer melakukan fungsi-fungsi pembentukan, perencanaan, pengaturan, pendorongan, sistem hubungan dan pengendalian. Termasuk dalam fungsi-fungsi ini adalah kepentingan untuk memimpin dan memberikan pengarahan. Karenanya, kecakapan seorang manajer dalam memimpin secara efektif dapat mempengaruhi perilaku orang-orang lainnya. Pimpinan yang efektif mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan John Kotter dalam Robbins dan Timothy (2008), melihat perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan, menurutnya manajemen terkait dengan usaha untuk menangani kompleksitas. Manajemen yang baik menghasilkan keteraturan dan konsistensi dengan cara mempersiapkan rencana formal, merancang struktur organisasi yang kuat dan memonitor hasil berdasarkan rencana. Sebaliknya, kepemimpinan berkaitan dengan perubahan. Pemimpin menentukan arah dengan cara mengembangkan suatu visi masa depan, kemudian mereka menyatukan orang-orang dengan mengkomunikasikan visi ini dan menginspirasi mereka untuk mengatasi berbagai rintangan.

Kepemimpinan dibutuhkan dalam proses pemberdayaan karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggotanya guna mencapai tujuan bersama. Andrew dan Dubrin (2006) juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kekuatan yang dinamis dalam memotivasi dan mengkoordinasi anggota kelompoknya. Dukungan kepemimpinan dalam tercapainya sebuah tujuan sangat dibutuhkan baik oleh kelompok taninya maupun oleh anggota kelompok taninya. Kepemimpinan juga memiliki andil dalam mempengaruhi sukses tidaknya kegiatan pemberdayaan terhadap anggota kelompok tani.

Kemampuan suatu kelompok adalah akses informasi teknologi dan menyebarkan teknologi tersebut dalam anggota kelompok sangat tergantung pada seberapa dinamis kelompok tersebut. Untuk meningkatkan dinamika kelompok tani tersebut perlu dilakukan pembinaan kelompok agar kelompok lebih hidup dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Setiana,2005).

Motivasi utama keikutsertaan anggota dalam kelompok tani adalah didorong oleh hasrat meningkatkan kemampuan berusahatani dan pemenuhan kebutuhan primer, terutama untuk mendapatkan

sarana produksi pertanian dan peternakan yang mencukupi (Mardikanto, 1993).

f. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja kognitif yang memuat sikap-sikap, nilai-nilai, norma-norma dan pengharapan-pengharapan bersama yang dimiliki oleh anggota-anggota organisasi (Greenberg dan Baron, 2000).

Menurut Stoner (1996), dalam Waridin dan Masrukhin (2006), budaya (*culture*) merupakan gabungan kompleks dari asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, *metafora* dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya organisasi atau *corporate culture* sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi anggota organisasi tersebut merasa berbeda dengan organisasi lain.

Robins (2007) menyatakan bahwa, budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik.

“One factor affecting the efficiency of organizations relates to psychological issues which lead to the increase in qualitative and quantitative efficiency of the organizations in different ways, e.g. improving relations, identifying personnel’s mentality, individuals’ personality and habits, as well as provisions for preventing deficiencies, absenteeism, work slowness, waste of workforce, distresses, and disorder. Nowadays, after human and social capital, positive

organizational behavior can be considered as a competitive advantage in organizations”(Memari *et al*, 2013).

Memari *et al* (2013) menjelaskan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi organisasi, berkaitan dengan masalah psikologis yang menyebabkan peningkatan efisiensi organisasi secara kualitatif dan kuantitatif dengan berbagai cara, seperti. memperbaiki hubungan, mengidentifikasi mentalitas personil, kepribadian dan kebiasaan individu, serta ketentuan untuk mencegah kekurangan, ketidakhadiran, kelambatan kerja, pemborosan tenaga kerja, kesusahan, dan kekacauan. Saat ini, setelah sumber daya manusia dan modal sosial, perilaku atau budaya organisasi yang positif dapat dianggap sebagai keunggulan kompetitif dalam organisasi.

Budaya organisasi dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam menghadapi berbagai perubahan. Dinyatakannya pula bahwa budaya organisasi pada hakikatnya merupakan sistem makna bersama atau dengan kata lain berkaitan dengan masalah nilai-nilai yang dianut bersama. Sistem makna bersama ini, bila dicermati secara lebih seksama merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi. Sebuah penelitian mengemukakan karakteristik-karakteristik utama yang secara bersama-sama menangkap esensi dari budaya organisasi, sebagai berikut: (1) inovasi dan pengambilan resiko yaitu berkaitan dengan sejauh mana para anggota organisasi didorong untuk inovatif dan mengambil resiko, (2) perhatian ke rincian yaitu berkaitan dengan sejauh mana para anggota organisasi diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian, (3) orientasi hasil yaitu berkaitan dengan sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut, (4) keagresifan yaitu berkaitan dengan sejauh mana individu-individu dalam organisasi memiliki keagresifan dan sikap kompetitif, (5) kemandapan yaitu berkaitan dengan sejauh mana kegiatan organisasi yang

melibatkan individu-individu di dalamnya mempertahankan *status quo* dibandingkan dengan pertumbuhan (Robbins, 2002).

Budaya organisasi sebagai seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi, untuk menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam hubungannya dengan partisipasi, keterlibatan merupakan faktor kunci dari budaya organisasi untuk menciptakan keefektifan. Organisasi dengan tingkat keikutsertaan, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dapat bergantung pada sistem manajemen yang terbentuk berdasarkan *konsensus* atau kesepakatan bersama. Budaya organisasi yang kuat dan tingkat partisipasi tinggi yang dianut pihak manajer secara konsisten, maka hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan kinerja yang unggul (Hofstede dalam Supomo dan Indriantoro, 1998).

g. Peran Pemerintah

Aparatur pemerintah sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai *dinamisator* (memberi bimbingan), *katalisator* (mendorong laju pembangunan), maupun sebagai pelopor (mengayomi masyarakat) dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan partisipasi penuh dari masyarakat (Pamudji, 1992).

Ndraha (1987) mengungkapkan, peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dan pada pembangunan tersebut. Kegagalan pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan.

“The most fundamental rationale for creating Local Government anywhere in the world is to employ it to take responsibility for the development of the area directly and also contribute indirectly to the development of the nation. Development is a process of gradual change and planned inducement for progressive improvement. It involves both physical change and improved competence of people. It also entails improvement in the socio-economic and technological systems that operate in a given country. Rural development had been tied to agricultural development Programmes and is supported by extension services and an attempt to improve agricultural output has always been seen as a facet of rural development. It is thus difficult to segregate rural development from agricultural productivity improvement and modernization efforts under Local’s approach” (Agbamu, 2006 in Nwalieji and Igbokwe, 2011).

Agbamu (2006) dalam Nwalieji dan Igbokwe (2011), menyatakan bahwa alasan paling mendasar untuk menciptakan Pemerintah Daerah di manapun di dunia adalah mempekerjakannya untuk bertanggung jawab atas pembangunan daerah secara langsung dan juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap pembangunan bangsa. Pembangunan adalah proses perubahan bertahap dan dorongan yang direncanakan untuk kemajuan yang progresif. Ini melibatkan perubahan fisik dan peningkatan kompetensi orang. Ini juga memerlukan perbaikan sistem sosio-ekonomi dan teknologi yang beroperasi di negara tertentu. Pembangunan pedesaan telah dikaitkan dengan program pembangunan pertanian dan didukung oleh penyuluhan dan upaya untuk memperbaiki hasil pertanian selalu

dipandang sebagai aspek pembangunan pedesaan. Dengan demikian sulit untuk memisahkan pembangunan pedesaan dari peningkatan produktivitas pertanian dan upaya modernisasi di bawah pendekatan daerah.

6. Tahapan Tingkat Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi mencerminkan upaya mewujudkan kemandirian daerah yang transparan dan *akuntabel* antara komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta, yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki secara terukur dan berkelanjutan. Kondisi ini dapat berlangsung dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipatif; 2) transparansi; 3) *akuntabilitas*. Partisipatif dalam proses pembangunan diantaranya melalui berbagai program kebijakan pembangunan pertanian dimaksudkan agar dapat menjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat petani di pedesaan. Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran publik bahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan pertanian di pedesaan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan keterlibatan masyarakat petani dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut, dari awal hingga akhir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani (Elizabeth, 2008).

Cohen dan Uphoff (1977), membagi partisipasi dalam empat jenis partisipasi yang paling signifikan dalam kegiatan pembangunan di pedesaan yaitu diantaranya: (1) *participation in decision making* (2). *participation in implementation* (3) *participation in benefits* (4). *participation in evaluation*

Dalam Mardikanto (2009), khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Lee J. Cary (1987) dengan mengutip pendapat

Warren menyatakan bahwa, partisipasi dapat diartikan sebagai suatu keterlibatan warga masyarakat dalam arti luas (yang mencakup banyak hal) demi masa depan yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Keterlibatan tersebut, oleh Yadav (1980) diidentifikasi, sebagai:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh Pemerintahan Pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan hanya agar tujuannya dapat dicapai seperti diharapkan tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang

Slamet (1993) mengemukakan adanya tiga bentuk kegiatan partisipasi yaitu : (1) partisipasi tahap perencanaan, (2) partisipasi dalam tahap pelaksanaan. (3) partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Partisipasi pada tahap perencanaan

Keterlibatan seseorang dalam perencanaan pembangunan sekaligus membawa dalam proses pembentukan keputusan, mencakup empat tingkatan yang pertama ialah mendefinisikan situasi yang menghendaki adanya keputusan. Kedua memilih alternatif yang cocok untuk dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi, dan yang ketiga, menentukan cara terbaik agar keputusan yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Dengan demikian dalam tahapan ketiga ini merupakan jabaran rencana, *opersionalisasi* rencana. Berikutnya adalah mengevaluasi akibat apa saja yang timbul sebagai akibat dari pilihan keputusan itu.

b. Partisipasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengukuran titik tolak pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas *riil* yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan di dalam kegiatan-kegiatan fisik.

c. Partisipasi pada tahap pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan ialah partisipasi masyarakat dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil-hasil kegiatan pembangunan.

Slamet (1993), mengemukakan unsur dalam partisipasi antara lain: kepengurusan, frekuensi kehadiran dalam rapat, frekuensi mengajukan usul/saran dan diterima tidaknya usul/saran yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat tahap perencanaan. Pengukuran partisipasi tahap pelaksanaan menggunakan unsur : bentuk bantuan (tenaga, uang dan materi yang disumbangkan). Sedangkan partisipasi tahap pemanfaatan diukur dari sejauh mana anggota masyarakat memetik hasil dari program yang dilakukan.

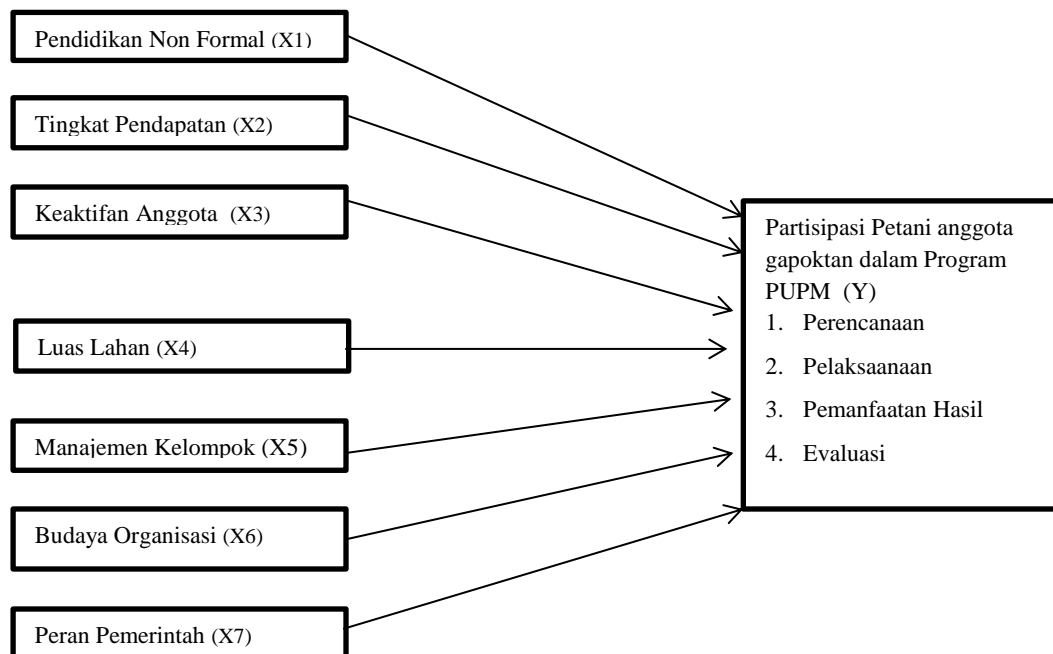
C. Kerangka Berpikir.

Partisipasi petani anggota gapoktan melalui program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) adalah keikutsertaan petani anggota gapoktan untuk mengikuti program tersebut dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil serta evaluasi. Partisipasi petani anggota gapoktan pada tahap perencanaan berupa keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan sosialisasi program. Tingkat partisipasi ini dapat dilihat dari pemahaman terhadap dari tujuan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dalam menghadiri rapat untuk pengambilan keputusan, intensitas dalam mengajukan ide, dan sejauh mana ide tersebut diterima oleh anggota yang lain, seperti menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang membagi partisipasi dalam empat jenis partisipasi yang paling signifikan dalam kegiatan pembangunan di pedesaan yaitu diantaranya: *participation in decision making participation in implementation participation in benefits and participation in evaluation* yang berarti partisipasi dalam pembuatan keputusan (perencanaan), partisipasi pada pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebut karakteristik petani, yang meliputi pendidikan non formal, pendapatan, pengalaman, keaktifan keanggotaan petani, luas penguasaan lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi dan peran pemerintah.

Soetrisno (1995), menyatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Maleba *et al* (2015), menambahkan bahwa partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok tani dilihat dari keaktifan anggota dalam berbagai kegiatan dalam kelompok tani. Sedangkan untuk faktor lainnya yang dapat mempengaruhi partisipasi menurut Stephen P Robbins dan Timothy (2008), adalah manajemen kelompok, sedangkan Hofstede dalam Supomo dan Indriantoro (1998), menyatakan bahwa budaya organisasi dapat berpengaruh terhadap partisipasi, selain itu Pamudji (1992) dan Ndraha (1987) mengemukakan bahwa pemerintah berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sehingga dari uraian diatas mengenai tingkatan atau tahapan partisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, maka kerangka berpikir dari penelitian ini adalah



Gambar 1. Kerangka Berpikir Partisipasi Petani Anggota Gapoktan dalam Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

D. Hipotesis

Berdasarkan alur kerangka berpikir yang telah digambarkan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Diduga ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel seperti pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi dan peran pemerintah terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

E. Pembatasan Masalah

1. Dalam penelitian hanya membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang diteliti adalah tingkat pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi dan peran pemerintah.
2. Partisipasi petani anggota gapoktan dalam Program PUPM meliputi : tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi.

3. Petani anggota gapoktan yang diambil sampel yaitu anggota kelompok yang mengikuti Program PUPM yaitu petani petani anggota gapoktan dari masing-masing Kelompok Tani Mumpuni I, Mumpuni II, Mumpuni III dan Mumpuni IV di Desa Mancasan.

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

- a. Faktor faktor yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang meliputi :

- 1) Pendidikan Non Formal adalah keikutsertaan dalam penyuluhan dan pelatihan berdasarkan frekuensi yang diikuti oleh petani anggota gapoktan diukur dengan skala rasio dan dinyatakan dalam satu tahun terakhir.
- 2) Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dari usaha tani maupun non usaha tani yang diperoleh dengan biaya pengeluaran usahatani, non usaha tani dan pengeluaran rumah tangga dalam satu musim tanam diukur dengan skala rasio dan dinyatakan dalam rupiah.
- 3) Keaktifan anggota merupakan keikutsertaan petani anggota gapoktan mengikuti kegiatan rutin dalam organisasi kelompok, memberikan ide atau gagasan disetiap pertemuan rutin kelompok dan diterimanya ide atau gagasan tersebut sebagai keputusan yang diukur dengan skala ordinal dinyatakan dalam satu musim tanam.
- 4) Luas lahan merupakan keseluruhan luas lahan yang diusahakan petani anggota gapoktan yang meliputi lahan milik sendiri, lahan sewa, lahan menyakap, dan lahan bengkok pada saat dilakukan penelitian yang diukur dengan skala rasio dan dinyatakan dalam ha (hektar).
- 5) Manajemen kelompok, terdiri dari 3 (tiga) sub variabel yaitu:
 - (1) Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam melibatkan petani anggota gapoktan dalam perencanaan ,

pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program PUPM yang dapat mempengaruhi partisipasi petani anggota gapoktan yang diukur dalam skala ordinal dinyatakan dalam satu tahun terakhir.

- (2) Regulasi atau aturan-aturan kelompok adalah kesesuaian aturan dalam pertemuan rutin kelompok, kesesuaian anggota dalam membayar iuran rutin kelompok, kesesuaian aturan kelompok dengan kepentingan kelompok yang dapat mempengaruhi partisipasi petani anggota gapoktan yang diukur dalam skala ordinal dinyatakan dalam satu tahun terakhir.
 - (3) Transparansi adalah intensitas terbukanya akses informasi didalam kelompok baik itu terkait keuangan dalam kelompok, maupun penyebaran informasi bidang pertanian dan terbukanya komunikasi didalam kelompok yang dapat mempengaruhi partisipasi petani anggota gapoktan yang diukur dalam skala ordinal dinyatakan dalam satu tahun terakhir
- 6) Budaya Organisasi adalah kebiasaan atau perilaku petani anggota gapoktan yang mencirikan organisasi kelompok seperti dalam mengambil resiko, kebiasaan dalam menerima pembaharuan (inovasi), kebiasaan dalam mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan kelompok yang diukur dalam skala ordinal dan dinyatakan dalam satu tahun terakhir.
 - 7) Peran Pemerintah adalah peranan pemerintah sebagai fasilitator dalam memberikan dana banper (bantuan pemerintah), dan fasilitator dalam memberikan pembinaan dan pendampingan dalam program PUPM yang dapat mempengaruhi partisipasi petani anggota gapoktan yang diukur dalam skala ordinal dinyatakan dalam satu tahun terakhir.

- b. Partisipasi petani anggota gapoktan adalah keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi.
- 1) Partisipasi pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam tahap perencanaan yang meliputi pengambilan keputusan, intensitas dalam menghadiri rapat rutin, intensitas dalam mengajukan ide atau gagasan pada rapat program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang diukur dengan skala ordinal dinyatakan dalam satu tahun terakhir.
 - 2) Partisipasi pada tahap pelaksanaan yaitu keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang meliputi keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam mengikuti setiap kegiatan dari program PUPM seperti keterlibatan dalam jual beli gabah untuk diproduksi oleh gapoktan, penggilingan gabah menjadi beras, pengemasan beras, dan distribusi atau pemasaran ke Toko Tani Indonesia (TTI) yang diukur dengan skala ordinal dinyatakan dalam satu tahun terakhir.
 - 3) Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil yaitu sejauh mana petani anggota gapoktan dapat merasakan manfaat dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dilihat dari peningkatan pendapatan, harga tawar gabah yang lebih baik, terpenuhinya kebutuhan pangan dengan harga terjangkau yang diukur dengan skala ordinal dan dinyatakan dalam satu tahun terakhir.
 - 4) Partisipasi pada tahap evaluasi yaitu keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam menghadiri rapat evaluasi program, mengawasi berjalannya program dan memberi masukan atau saran terhadap pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

(PUPM) yang diukur dengan skala ordinal dinyatakan dalam satu tahun terakhir.

2. Pengukuran Variabel

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Tabel 2.2 Pengukuran variabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Skor
1	Pendidikan Formal	Non – Frekuensi Petani mengikuti kegiatan penyuluhan dalam 1 tahun terakhir	– 1-2 kali	1
			– 3-4 kali	2
			– 5-6 kali	3
			– 7-8 kali	4
			– >8 kali	5
		– Frekuensi Petani mengikuti kegiatan pelatihan dalam 1 tahun terakhir	– 1-2 kali	1
			– 3-4 kali	2
			– 5-6 kali	3
			– 7-8 kali	4
			– >8 kali	5
2	Pendapatan	– Selisih penerimaan dari usaha tani, non usaha tani dan pengeluaran dari usaha tani, rumah tangga dan non usaha tani dalam satu musim tanam	– < 1,5 juta	1
			– 1,5 juta – 3 juta	2
			– 3,1 juta – 4,5 juta	3
			– 4,6 juta – 6 juta	4
			– > 6 juta	5
3	Keaktifan Anggota	– Frekuensi keikutsertaan responden dalam pertemuan rutin selama satu musim tanam	– Tidak pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
			– Selalu	5
		– Frekuensi responden dalam memberikan ide dan gagasan dan diterimanya ide/gagasan tersebut disetiap rapat pertemuan kelompok selama satu musim tanam	– Tidak Pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
			– Selalu	5
4	Luas Lahan	– Keseluruhan luas lahan yang diusahakan responden pada saat dilakukan penelitian	– < 0,25Ha	1
			– 0,25-0,50 Ha	2
			– 0,50-0,75 Ha	3
			– 0,75- 1 Ha	4
			– > 1 Ha	5

Tabel 2.2 Pengukuran variabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Skor
5	Manajemen Kelompok			
	a. Kepemimpinan	– Kemampuan pemimpin dalam perencanaan Program PUPM yang meliputi kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan mengikuti Program PUPM dan menyebarkan informasi Program PUPM	– Sangat Tidak Baik – Tidak Baik – Netral – Baik – Sangat Baik	1 2 3 4 5
		– Kemampuan pemimpin dalam pelaksanaan Program PUPM yang meliputi kemampuan pemimpin dalam melibatkan petani anggota gapoktan pada jual beli gabah, penggilingan gabah, pengemasan produk, dan pemasaran	– Sangat Tidak Baik – Tidak Baik – Netral – Baik – Sangat Baik	1 2 3 4 5
		– Kemampuan pemimpin dalam pemanfaatan hasil Program PUPM yang meliputi kemampuan pemimpin dalam melibatkan petani anggota gapoktan untuk memanfaatkan hasil Program seperti penjualan gabah dengan harga yang relative baik, tercukupinya kebutuhan pangan beras dengan harga terjangkau	– Sangat Tidak Baik – Tidak Baik – Netral – Baik – Sangat Baik	1 2 3 4 5
		– Kemampuan pemimpin dalam Evaluasi Program PUPM yang meliputi kemampuan pemimpin dalam melibatkan petani anggota gapoktan untuk melakukan pengawasan pada semua kegiatan Program PUPM dan memberikan informasi terkait pencapaian Program PUPM	– Sangat Tidak Baik – Tidak Baik – Netral – Baik – Sangat Baik	1 2 3 4 5

Tabel 2.2 Pengukuran variabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Skor
5	Manajemen Kelompok			
	b. Regulasi kelompok	– Kesesuaian aturan kelompok dengan norma yang ada di masyarakat dan kesepakatan anggota lainnya	– Sangat Tidak Sesuai – Tidak Sesuai – Kurang Sesuai – Sesuai – Sangat Sesuai	1 2 3 4 5
		– Kesesuaian aturan kelompok dalam pertemuan rutin kelompok	– Sangat Tidak Sesuai – Tidak Sesuai – Kurang Sesuai – Sesuai – Sangat Sesuai	1 2 3 4 5
		– Kesesuaian anggota kelompok dalam membayar iuran rutin kelompok	– Sangat Tidak Sesuai – Tidak Sesuai – Kurang Sesuai – Sesuai – Sangat Sesuai	1 2 3 4 5
	c. Transparansi	– Intensitas terbukanya Komunikasi didalam kelompok dan intensitas terbukanya interaksi antar anggota dari kelompok lain	– Tidak Pernah – Jarang – Kadang – Sering – Selalu	1 2 3 4 5
		– Intensitas terbukanya akses informasi didalam kelompok seperti keuangan kelompok dan proses penyebaran informasi bidang pertanian kepada anggota lainnya	– Tidak Pernah – Jarang – Kadang – Sering – Selalu	1 2 3 4 5

Tabel 2.2 Pengukuran variabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Skor
6	Budaya Organisasi	– Kebiasaan atau perilaku responden mengambil resiko menjalankan dalam pekerjaan	– Tidak Pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Sering	4
			– Selalu	5
		– Kebiasaan menerima pembaharuan (inovasi) dalam berusaha tani	– Tidak Pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Sering	4
– Kebiasaan responden dalam mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan kelompok (ketepatan waktu responden dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok)	– Selalu terlambat	1		
	– Sering terlambat	2		
	– Kadang terlambat	3		
	– Sering tepat waktu	4		
7	Peran Pemerintah	– Peran pemerintah sebagai fasilitator pemberi dana bantuan	– Sangat Tidak berperan	1
			– Tidak berperan	2
			– Kurang berperan	3
			– Berperan	4
			– Sangat berperan	5
	– Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam memberikan pembinaan dan pendampingan Program PUPM	– Sangat Tidak berperan	1	
		– Tidak berperan	2	
		– Kurang berperan	3	
		– Berperan	4	
		– Sangat Berperan	5	

b. Tingkat partisipasi petani petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Tabel 2.3. Pengukuran variabel tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Skor
1.	Partisipasi anggota pada tahap perencanaan	– Keikutsertaan responden dalam mengambil keputusan mengikuti Program PUPM	– Tidak Pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
			– Selalu	5
			– Keikutsertaan dalam menghadiri rapat rutin Program PUPM	– Tidak Pernah
	– Jarang	2		
	– Kadang-kadang	3		
	– Pernah	4		
	– Selalu	5		
	– Keikutsertaan dalam mengajukan ide atau gagasan pada rapat Program PUPM dan intensitas ide/gagasan diterima	– Tidak Pernah	1	
	– Jarang	2		
– Kadang-kadang	3			
– Pernah	4			
– Selalu	5			
2.	Partisipasi petani anggota gapoktan pada tahap Pelaksanaan	– Keikutsertaan responden dalam mengikuti jual-beli gabah dalam Program PUPM	– Tidak pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
		– Selalu	5	
		– Keikutsertaan responden dalam mengikuti penggilingan gabah dalam Program PUPM	– Tidak pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
		– Selalu	5	
		– Keikutsertaan responden dalam pengemasan beras dalam Program PUPM	– Tidak pernah	1
			– Jarang	2
– Kadang-kadang	3			
– Pernah	4			
– Selalu	5			
– Keikutsertaan responden dalam pendistribusian beras ke Toko Tani Indonesia	– Tidak pernah	1		
	– Jarang	2		
	– Kadang-kadang	3		
	– Pernah	4		
– Selalu	5			

Tabel 2.3. Pengukuran variabel tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Skor
3	Partisipasi petani anggota gapoktan pada tahap pemnafaatan hasil	– Keterlibatan responden dalam memperoleh peningkatan pendapatan dari Program PUPM	– Tidak Pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
			– Selalu	5
		– Keterlibatan responden dalam memperoleh harga produksi gabah yang lebih baik dari Program PUPM	– Tidak Pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
– Keterlibatan responden dalam memperoleh kecukupan kebutuhan pangan dari Program PUPM dengan harga yang terjangkau	– Tidak Pernah	1		
	– Jarang	2		
	– Kadang-kadang	3		
	– Pernah	4		
	– Selalu	5		
4	Partisipasi Petani anggota gapoktan pada tahap Evaluasi	– Intensitas keikutsertaan responden dalam menghadiri rapat evaluasi Program PUPM	– Tidak pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
			– Selalu	5
		– Intesitas keikutsertaan responden dalam mengawasi berjalannya Program PUPM	– Tidak pernah	1
			– Jarang	2
			– Kadang-kadang	3
			– Pernah	4
– Intenstias keikutsertaan responden dalam memberikan masukan (saran) terhadap pelaksanaan Program PUPM yang telah berjalan	– Tidak pernah	1		
	– Jarang	2		
	– Kadang-kadang	3		
	– Pernah	4		
	– Selalu	5		

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian *explanatory*. Menurut Sugiyono (2012), penelitian *explanatory* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Mardikanto (2001) mengemukakan bahwa, metode kuantitatif memusatkan pada pengumpulan data yang berupa angka-angka yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis kuantitatif maupun dengan perhitungan matematika. Penelitian kuantitatif memiliki keunggulan yaitu mampu memberikan penilaian yang lebih objektif.

Teknik penelitian ini dilakukan dengan teknik survey. Susanto (2006) menjelaskan, desain survey merupakan riset yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. Fakta-fakta yang ada lebih digunakan untuk pemecahan masalah. Survey dapat bermanfaat misalnya, untuk membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan.

B. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu berdasarkan kesesuaian karakteristik yang dimiliki sample/responden dengan kriteria tertentu yang ditetapkan atau dikehendaki oleh peneliti sesuai tujuan penelitian (Mardikanto, 2001). Lokasi yang diambil adalah di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan satu-satunya desa yang mendapatkan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selain itu Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan desa yang telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) pada tahun 2016.

C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah petani, yang tergabung dalam Gapoktan Mumpuni Jaya di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 474 petani.

Tabel 3.1 Jumlah petani yang tergabung dalam Gapoktan Mumpuni Jaya di Desa Mancasan

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1	Mumpuni I	98
2	Mumpuni II	126
3	Mumpuni III	84
4	Mumpuni IV	166
	Jumlah	474

Sumber : BPP Kecamatan Baki 2016

2. Sampel

Penarikan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *proportional random sampling*, yaitu pengambilan responden dengan menetapkan jumlah tergantung besar kecilnya sub populasi atau kelompok yang akan diwakilinya (Mardikanto, 2001).

Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah 50 reponden. Dengan pertimbangan pendapat Arikunto (2006), bahwa sampel dapat diambil minimal 10% dari jumlah populasi. Pengambilan sampel minimal 10% dijelaskan apabila populasi lebih dari 100, dengan berbagai pertimbangan seperti kemampuan peneliti dari segi waktu, dana dan tenaga, serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh para peneliti.

Penentuan jumlah petani responden untuk masing-masing kelompok tani ditentukan dengan rumus:

$$n_i = \frac{nk}{N} n$$

Keterangan :

n_i = Jumlah responden dari masing-masing kelompok tani

nk = Jumlah petani dari tiap kelompok tani sebagai responden

N = Jumlah populasi atau jumlah petani

n = Jumlah petani responden (sampel) yang diambil

Tabel 3.2 Jumlah responden dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di desa Mancasan

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Jumlah Responden
1	Mumpuni I	98	10
2	Mumpuni II	126	14
3	Mumpuni III	84	9
4	Mumpuni IV	166	17
	Jumlah	474	50

Sumber : BPP Kecamatan Baki 2016

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari petani sebagai responden yang didapat dari kuisisioner dengan wawancara dan pengamatan langsung di lapang atau observasi. Didalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah tabel penelitian terdahulu, data hasil analisis penelitian seperti, hasil analisis distribusi frekuensi faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi dan distribusi frekuensi tahapan partisipasi dari mulai partisipasi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi serta hasil analisis terkait pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap partisipasi yang menggunakan analisis regresi berganda.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mencatat dan mengutip secara langsung dari instansi atau lembaga yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder di dalam penelitian ini yaitu data-data yang diambil dari profile desa untuk pembahasan keadaan wilayah,

data statistik luas lahan dan produksi padi di Kecamatan Baki, dan data mengenai jumlah petani di setiap kelompok tani di Desa Mancasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan membaca buku, literatur, jurnal untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini
2. Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (kuisisioner) oleh peneliti. Kuisisioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan variabel yang diamati, yakni mengenai tingkat partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
3. Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran penelitian yang berhubungan dengan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan beberapa cara yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Menurut Azwar (2008), validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

Menurut Sugiyono (2012), uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek

yang diteliti. Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi *product moment*. Skor ordinal dari setiap *item* pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan *item*, jika koefisien korelasi tersebut positif, maka tersebut valid, sedangkan jika negatif maka *item* tersebut tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuisioner atau digantikan dengan pernyataan perbaikan.

Rumus korelasi *product moment*:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Y = Jumlah skor total seluruh item Yi

X = Jumlah skor tiap item Xi

Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian dihitung nilai t_{hitung} untuk menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Setelah nilai t_{hitung} diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t_{hitung} tersebut dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,10$ dan derajat kebebasan (dk) = n - 2. Kaidah keputusannya adalah :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid.

Dari uji validitas pada kuisioner penelitian partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) menggunakan SPSS dengan 49 items atau pertanyaan dengan uji

coba responden sebanyak 20 responden dengan r_{tabel} 0,444 dibandingkan dengan r_{hitung} . Dari hasil analisis uji validitas dihasilkan 2 dari 49 *item* pertanyaan dinyatakan tidak valid, sehingga 2 *item* pertanyaan yang tidak valid di hapus atau dikeluarkan dari kuisisioner sehingga menjadi 47 *item* pertanyaan untuk uji selanjutnya.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu indeks penilaian yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat menunjukkan kenyataan yang dapat dipercaya atau tidak. Uji dapat dilakukan setelah uji validitas dan dilakukan pada pernyataan yang sudah memiliki validitas. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item pertanyaan dalam suatu variabel. Rumus dari uji reabilitas adalah :

$$K r / 1 + (k - 1) r$$

Keterangan :

α = koefisien reliabilitas

r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel

k = jumlah variabel dalam persamaan

Setelah menilai *alpha*, selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas pada tabel α yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antar jumlah butir pertanyaan dengan reliabilitas, maka instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui kepastiannya (*reliabet*) apabila memiliki *cronbach alpha* >0,67

Berikut adalah analisis uji reabilitas kuisisioner pada penelitian partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) nilai *cronbach alpha* menunjukkan nilai 0,953 yang berarti nilai tersebut lebih dari 0,67 sehingga instrumen atau kuisisioner bisa dikatakan reliabet atau terpercaya.

Tabel 3.3 Hasil Analisis Reabilitas dengan SPSS

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,943	,953	49

Sumber : Data Primer 2017

3. Pengukuran partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Untuk mengukur partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) menggunakan rumus:

$$\text{lebar interval kelas (i)} = \frac{\text{jumlah skor tertinggi} - \text{jumlah skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

4. Transformasi data ordinal menjadi data interval

Transformasi dilakukan dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*). Tujuan dari transformasi data ordinal menjadi interval yaitu untuk menguji analisis yang bersifat parametrik seperti uji analisis regresi berganda. Pemilihan analisis model parametrik hanya lazim digunakan apabila skala pengukuran yang dilakukan adalah minimal interval. Hal ini terjadi agar tidak melanggar kelaziman, juga untuk mengubah agar syarat distribusi normal bisa dipenuhi ketika menggunakan statistika parametrik.

5. Uji Asumsi Klasik

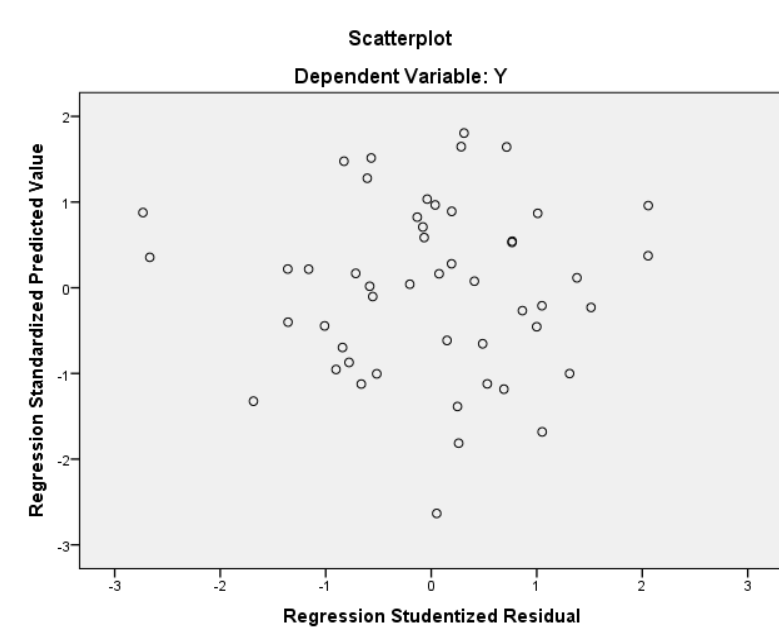
- a. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan *varians* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*

antara variabel dependen (terikat) dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat kurva heteroskedastisitas atau diagram pencar (*chart*), dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

- 1) Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedostisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah atau diatas 0 ada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut adalah gambar uji heteroskedastisitas pada analisis asumsi klasik yang telah dilakukan pada penelitian partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), dapat dilihat bahwa pola titik-titik menyebar dbawah dan diatas 0 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau disebut homoskedastisitas.



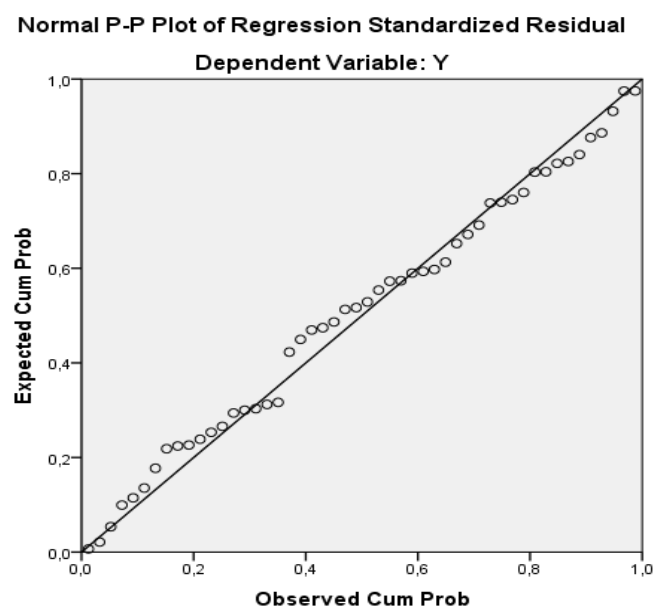
Gambar 2. Hasil uji heterokedastisitas

b. Uji Normalitas

Digunakan untuk melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan yang mendekati distribusi normal dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar yang dapat diambil untuk mengambil keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut adalah gambar uji normalitas pada analisis asumsi klasik yang telah dilakukan pada penelitian partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

(PUPM), dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 3. Hasil uji normalitas

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas). Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam melihat nilai *tolerance* yaitu dilihat dari nilainya apabila nilai

tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji, sedangkan melihat dari nilai VIF yaitu apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

Berikut adalah tabel uji multikolinieritas pada analisis asumsi klasik yang telah dilakukan pada penelitian partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 sehingga bisa dikatakan bebas multikolinieritas dan model regresi tersebut baik karena tidak ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independennya.

Tabel 3.4 Hasil Analisis Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
,674	1,484
,783	1,277
,573	1,746
,764	1,308
,488	2,051
,610	1,640
,627	1,595

Sumber : Data Primer 2017

6. Uji Kesesuaian

a. Model Persamaan Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \mu$$

Dimana :

α = konstanta

Y = Variabel dependen partisipasi petani anggota gapoktan

X_1 = Variabel independen pendidikan non formal

X_2 = Variabel independen pendapatan

X_3 = Variabel independen keaktifan anggota

X_4 = Variabel independen luas lahan

X_5 = Variabel independen manajemen kelompok

X_6 = Variabel independen budaya organisasi

X_7 = Variabel independen peran pemerintah

μ = Faktor yang tidak diteliti

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011)

c. Uji F

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji F adalah sebagai berikut:

1) Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 10\%$ Tingkat signifikansi 0.10% atau 10% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 90% atau toleransi kesalahan 10%.

2) Menghitung Uji F (*F-test*)

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien determinasi gabungan

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah sampel

3) Kriteria Pengambilan Keputusan

- i. H_0 ditolak jika F statistik $< 0,10$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$
- ii. H_0 tidak berhasil ditolak jika F statistik $> 0,10$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$

nilai F_{tabel} didapat dari :
 df1 (pembilang) = jumlah variabel independen
 df2 (penyebut) = $n-k-1$
 keterangan :
 n : jumlah observasi
 k : variabel independen

d. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 10\%$ Tingkat signifikansi 0.10% atau 10% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 90% atau toleransi kesalahan 10% .

2) Menghitung Uji t

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

3) Kriteria Pengambilan Keputusan

- i. H_0 ditolak jika t statistik $< 0,10$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$
- ii. H_0 diterima jika t statistik $> 0,10$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$

nilai t_{tabel} didapat dari : $df = n-k-1$

keterangan :

n : jumlah observasi

k : variabel independen

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian

1. Keadaan Wilayah

Desa Mancasan merupakan salah satu desa di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dengan luas 276,4669 ha/m², yang berbatasan dengan Desa Bantakan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo disebelah utara, Sungai Bengawan Solo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo disebelah timur, Desa Bener Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten disebelah selatan dan Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo disebelah barat. Jarak Desa Mancasan dengan kecamatan sejauh 3 km, dengan jarak tempuh 10 menit, dengan ibukota kabupaten sejauh 10 km, dengan jarak tempuh 30 menit, dengan ibukota provinsi sejauh 100 km, dengan jarak tempuh 3 jam (Profil Desa Mancasan, 2017).

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk disuatu daerah menggambarkan kondisi sosial ekonomi penduduk di daerah tersebut. Data keadaan penduduk di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo berdasarkan profil Desa Mancasan.

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan nilai sex ratio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 4.1 Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.964	46
2	Perempuan	3.473	54
Total		6.437	100

Sumber : Profil Desa Mancasan 2017

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Mancasan adalah 6.437 jiwa, yang terdiri dari 2.964 jiwa penduduk laki-laki, dan 3.473 jiwa penduduk perempuan, maka dapat dihitung sex ratio sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Sex Ratio} &= \frac{\text{Jumlah Laki-laki}}{\text{Jumlah Perempuan}} \times 100 \\
 &= \frac{2964}{3473} \times 100 \\
 &= 85,34
 \end{aligned}$$

Angka sex ratio di Desa Mancasan sebesar 85,34. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 85 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Dengan demikian pembagian kerja yang harus ditanggung oleh keduanya tidak jauh berbeda, misalnya dalam menggarap lahan sawah perempuan cenderung melakukan pekerjaan yang ringan seperti menanam dan memelihara tanaman.

Angka sex ratio dapat digunakan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia. Pada umumnya, pekerjaan dibidang pertanian lebih membutuhkan kekuatan fisik, sehingga kaum laki-laki lebih banyak berperan aktif dalam kegiatan pertanian misalnya pada kegiatan penanaman atau penyiangan padi di sawah. Dengan sex ratio sebesar 85, ternyata kaum perempuan mampu berperan aktif dalam kegiatan di sektor pertanian, terbukti dengan munculnya sektor pertanian sektor yang terbesar di Desa Mancasan.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

Keadaan penduduk menurut umur diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk yang sudah masuk dalam usia kerja atau dengan kata lain untuk mengetahui jumlah penduduk produktif dan jumlah penduduk non produktif. Berikut adalah data penduduk menurut umur

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut umur di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)
1.	0-4	513
2.	5-9	621
3.	10-14	618
4.	15-19	519
5.	20-24	369
6.	25-29	373
7.	30-39	745
8.	40-49	755
9.	50-59	746
10.	>60	1178

Sumber: Profil Desa Mancasan 2017

Dari tabel diatas dapat dihitung bahwa penduduk non produktif (0-14 tahun dan >60 tahun) di desa Mancasan sebesar 2.312 jiwa, sedangkan penduduk produktif (15 – 59 tahun) di desa Mancasan sebesar 3.507 jiwa. Dengan demikian, keadaan penduduk menurut umur ini dapat digunakan untuk menghitung ABT (Angka Beban Tanggungan) suatu wilayah, berikut

ABT Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo :

$$\begin{aligned}
 \text{ABT} &= \frac{\sum \text{Penduduk non Produktif} \times 100}{\sum \text{Penduduk Produktif}} \\
 &= \frac{2312 \times 100}{3507} \\
 &= 66
 \end{aligned}$$

Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan > 60 tahun) dengan penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) dikalikan 100. Angka Beban Tanggungan (ABT) di Desa Mancasan adalah 66 . Sehingga

Angka Beban Tanggungan (ABT) yang ditanggung oleh masyarakat di Desa Mancasan termasuk dalam kategori sedang.

Angka Beban Tanggungan (ABT) ini mempunyai arti bahwa tiap 100 penduduk usia produktif di Desa Mancasam menanggung 66 penduduk usia non produktif. Semakin banyak usia non produktif, maka Angka Beban Tanggungan (ABT) akan semakin besar. Sebaliknya jika penduduk usia non produktif sedikit, maka Angka Beban Tanggungan (ABT) akan semakin kecil.

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi dan inovasi dari sasaran penyuluhan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kecepatan adopsi dan inovasi dari sasaran penyuluhan akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Pengetahuan merupakan salah satu komponen perilaku petani yang turut menjadi faktor dalam adopsi inovasi. Tingkat pengetahuan petani mempengaruhi petani dalam mengadopsi teknologi baru dan kelanggengan usahatani. Adapun tingkat pendidikan yang ada di Desa Mancasan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	TK	228	8,90
2.	Belum Tamat SD	0	0,00
3	Tamat SD/Sederajat	662	26,00
4	Tamat SMP/Sederajat	605	23,40
5	Tamat SMA//Sederajat	908	35,00
6	Tamat Perguruan Tinggi	174	6,70
Jumlah Total		2577	100

Sumber: Profil Desa Mancasan 2017

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Mancasan termasuk dalam kategori cukup baik, dimana tamatan SMA mencapai 35% walaupun hanya sekitar 6,7% orang saja yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tingkat

pendidikan yang tinggi di suatu desa menandakan tingkat sumber daya manusia lebih baik, sehingga hal tersebut menjadi suatu kemudahan bagi masyarakat desa dalam menerima inovasi dan pengetahuan dan menerapkan inovasi serta pengetahuan tersebut.

d. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Berbagai macam dan jumlah mata pencaharian dapat digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian digunakan untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi dan karakteristik desa dengan melihat mata pencahariannya yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian yang mereka miliki mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk Desa Mancasan karena salah satu indikator dalam kesejahteraan penduduk adalah berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh, sehingga apabila semakin mapan seseorang dalam bermata pencaharian, maka semakin mapan pula kesejahteraan hidup mereka.

Tabel 4.4. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Mancasan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Petani	781	31,00
2.	Buruh Tani	179	7,10
3.	Buruh Migran Perempuan	4	0,16
4.	Buruh Migran Laki-laki	5	0,20
5.	Pegawai Negeri Sipil	106	4,20
6.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	193	7,65
7.	Pedagang Keliling	24	0,95
8.	Peternak	62	2,46
9.	Montir	5	0,20
10.	Perawat Swasta	5	0,20
11.	Pembantu Rumah Tangga	3	0,12
12.	TNI	15	0,60
13.	POLRI	2	0,08
14.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	51	2,02

15	Dukun Kampung Terlatih	1	0,04
16	Karyawan Perusahaan Swasta	1086	43,10
Jumlah Total		2.522	100

Sumber: Profil Desa Mancasan 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat yang paling banyak dilakukan yaitu sebagai karyawan perusahaan swasta sebanyak 1.086 orang atau 43,1 %. Lokasi Desa Mancasan di Kecamatan Baki memang dekat dengan perusahaan-perusahaan disekitar Solo Baru (Kecamatan Grogol). Selain itu, Desa Mancasan merupakan sentra usaha gitar di Kecamatan Baki dan Kabupaten Sukoharjo. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Mancasan sebagian besar bekerja sebagai tenaga atau karyawan swasta, sehingga dikatakan cukup sejahtera karena masyarakat disana tidak hanya bergantung pada pertanian, yang mana pada data menduduki posisi kedua yaitu 31%.

3. Kelembagaan

a. Kelembagaan Pemerintah

Kelembagaan Pemerintah merupakan sebuah instansi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat Desa Mancasan dalam melakukan birokrasi yang ada di desa mereka, sehingga dengan adanya kelembagaan pemerintah yang jelas dan baik, maka masyarakat Desa Mancasan semakin mudah dalam melakukan kegiatan bermasyarakat dan birokrasi.

Tabel 4.5. Data Lembaga Pemerintahan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Pemerintah Desa	Jumlah
1.	Kepala Dusun	4
2.	RW	12
3.	RT	31

Sumber: Profil Desa Mancasan 2017

Dari data kelembagaan pemerintahan di atas, dapat diketahui jumlah dusun di Desa Mancasan sebanyak 4.yaitu Dusun Dukuh Kulon, Dusun Teplok, Dusun Gebangan, dan Dusun Branglor yang masing-masing

dipimpin oleh kepala dusun. Jumlah RW sebanyak 12, sedangkan jumlah RT sebanyak 21.

b. Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kehidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan pertanian di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo memiliki kelembagaan berupa kelompok tani. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antarpetani.

Kelompok-kelompok tani ini memiliki anggota yaitu petani yang berada di desa tersebut. Dalam setiap kelompok tani terdapat kelompok tani yang homogen yaitu kelompok tani yang anggotanya memiliki usahatani dengan komoditas yang sama, selain itu terdapat kelompok tani heterogen yaitu kelompok tani yang anggotanya memiliki usahatani dengan komoditas yang berbeda.

Tabel 4.6. Data Kelembagaan Pertanian di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota (orang)
1.	Mumpuni I	98
2.	Mumpuni II	126
3.	Mumpuni III	84
4.	Mumpuni IV	166
Jumlah Total		474

Sumber: BPP Kecamatan Baki 2016

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Desa Mancasan memiliki kelembagaan pertanian yaitu kelompok tani yang berjumlah 4 kelompok. Kelompok Tani Mumpuni I merupakan kelompok yang berada di Dusun Dukuh Lor, Kelompok Tani Mumpuni II berada di Dusun Branglor, Kelompok Tani Mumpuni III berada di Dusun Gebangan sedangkan Kelompok Tani Mumpuni IV berada di Dusun Teplok.

c. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan lembaga perekonomian atau usaha perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mancasan . Usaha di bidang perekonomian ini merupakan mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin banyak dan beragam usaha yang mereka lakukan, maka semakin sejahtera pula masyarakat di Desa Mancasan .

Tabel 4.7. Data Kelembagaan Ekonomi di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Lembaga	Jumlah/unit	Jumlah tenaga (orang)
1.	Kelompok Simpan Pinjam	66	230
2.	Bumdes	2	15
3	Industri Makanan	3	14
4	Industri Material Bangunan	22	-
5	Industri Kerajinan	172	-
6	Toko/Kios	95	95
7	Jasa Grup Musik	5	22
Jumlah Total		365	376

Sumber: Profil Desa Mancasan 2017

Data di atas menunjukkan kelembagaan ekonomi yang terdapat di Desa Mancasan, antara lain kelompok simpan pinjam, bumdes, industri makanan, kerajinan dan bahan material, toko kios dan jasa grup musik. kelembagaan ekonomi dan berbagai macam unit usaha dipedesaan adalah pilar atau penyangga ekonomi yang diharapkan mampu mendukung dan menopang kegiatan pembangunan dipedesaan dalam berbagai bidang. Kelembagaan ekonomi di Desa Mancasan yang terbanyak adalah industri kerajinan. Industri kerajinan tersebut yaitu kerajinan alat musik gitar, sehingga Desa Mancasan merupakan desa penghasil alat musik gitar atau bisa disebut sentra gitar di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

d. Kelembagaan Pendidikan

Faktor pendidikan adalah bagian penting bagi pengembangan sebuah daerah, sumber daya manusia yang berkualitas bisa dicetak

lewat pendidikan. Fasilitas pendidik yang memadai akan sangat menunjang peningkatan proses pendidikan yang terjadi. Berikut ini sajian data terkait sarana pendidikan umum maupun khusus dan jumlah guru dan murid di desa Mancasan.

Tabel 4.8 Sarana Pendidikan Umum dan Jumlah Guru dan Murid di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (unit)	Jumlah Murid (orang)	Jumlah Guru (orang)
1	Taman Kanak-kanak (TK)	4	152	12
2	Sekolah Dasar (SD)	4	416	53
Jumlah Total		8	568	65

Sumber : Profil Desa Mancasan 2017

Data diatas menunjukkan bahwa di Desa Mancasan terdapat beberapa lembaga pendidikan yang dibutuhkan masyarakat desa yaitu diantaranya adalah Taman Kanak-KanaK (TK) dan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah masing-masing sama yaitu 4 unit sekolah. Dalam lingkup desa, lembaga pendidikan yang ada biasanya hanya tingkat Taman Kanak-KanaK (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Begitu pula dengan di Desa Mancasan, sehingga apabila penduduk desa ingin melanjutkan ke tingkat SMP ataupun SMA mereka harus menempuh jarak di luar Desa Mancasan. Walaupun begitu, pendidikan penduduk Desa Mancasan termasuk dalam kategori baik, karena sebagian dari mereka mampu menempuh pendidikan jenjang SMA walaupun sarana pendidikan tersebut berada di luar desa.

4. Keadaan Pertanian

Salah satu sektor utama dalam pembangunan di pedesaan adalah sektor pertanian karena sebagian besar masyarakat desa memiliki mata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Berikut ini adalah gambaran mengenai keadaan pertanian di Desa Mancasan:

a. Penggunaan Lahan Pertanian

Kegiatan pertanian mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kondisi pertanian yang baik harus didukung oleh

tersedianya lahan usaha tani yang potensial, teknologi yang mendukung, serta sumber daya manusia yang memadai untuk mengolah lahan usaha tani secara optimal. Luas penggunaan lahan pertanian di Desa Mancasan Kecamatan Baki

Tabel 4.9 Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Daerah	Luas Daerah (ha/m ²)	Presentase (%)
1.	Tanah Sawah		
	a. Irigasi Teknis	158,0000	56,60
	b. Irigasi Setengah Teknis	2,0000	0,72
	Jumlah	160,0000	57,40
2.	Tanah Kering		
	a. Pekarangan	37,4328	13,43
	b. Tegalan/kebunan	2,1765	0,78
	c. Pemukiman	60,7624	21,80
	Jumlah	100,3717	36,00
3	Lain-lain	18,2717	6,60
	Jumlah Total	278,6434	100

Sumber : Profil Desa Mancasan 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan pertanian di Desa Mancasan yang terbesar adalah tanah sawah yang terdiri dari irigasi teknis dan irigasi setengah teknis Luas penggunaan lahan di Desa Mancasan didominasi oleh tanah sawah dari pada tanah kering. Tanah kering sendiri terdiri dari pekarangan, tegalan/kebunan dan pemukiman. sedangkan lain-lain terdiri dari tanah pemakaman, perkantoraan dan taman. Luas tanah sawah seluas 160 ha jika dibagi jumlah petani yang berada di Desa Mancasan yaitu 781 orang maka rata-rata kepemilikan luas lahan perorang yaitu hanya 0,20 ha atau bisa dikatakan luas penguasaan lahan di Desa Mancasan terbilang sempit jika dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

b. Komoditas Utama

Komoditas yang diusahakan pada masing-masing daerah tidak sama. Komoditas di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi tanah, topografi dan sumberdaya manusia. Komoditas utama

di Desa Mancasan adalah tanaman padi, karena dari segi topografi tanaman tersebut memang cocok ditanam di daerah tersebut.

c. Peternakan

Desa Mancasan memiliki beberapa jenis usaha peternakan. Berikut ini data mengenai beberapa jenis peternakan yang diusahakan di Desa Mancasan.

Tabel 4.10 Jumlah peternakan di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)	Presentase (%)
1	Sapi	59	0,741
2	Kerbau	4	0,050
3	Babi	12	0,151
4	Ayam Kampung	6435	81,000
5	Bebek	1350	17,000
6	Kambing	92	1,150
7	Angsa	8	0,100
	Jumlah	7960	100

Sumber : Profil Desa Mancasan 2017

Data diatas menunjukkan bahwa di Desa Mancasan ternak yang diusahakan ada beberapa jenis seperti sapi, kerbau, babi, ayam kampung, bebek, kambing, dan angsa. Dari beberapa jenis ternak tersebut ayam kampung merupakan jenis usaha ternak yang paling diminati oleh penduduk Desa Mancasan. Penduduk Desa Mancasan selain bekerja disektor pertanian usaha tani, mereka juga bekerja sampingan sebagai peternak. Hal ini dikarenakan hasil disektor usaha tani tidak begitu menjanjikan, hasil tersebut bahkan biasanya lebih sering dipasok untuk kebutuhan pangan keluarga. Berbeda dengan usaha ternak, hasil dari beternak sapi, ayam kampung, bebek, kambing bisa dijual dengan keuntungan yang lebih baik.

B. Gambaran Umum Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang mengacu pada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan PUPM.

Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, sesuai dengan 2 (dua) Undang-Undang (UU) terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Adapun tujuan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) adalah menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis, mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, dan memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan wajar. Sasaran dari program PUPM adalah gapoktan. Pada tahun 2016, pemerintah

menganggarkan 500 gapoktan yang melayani 1000 Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Kriteria yang harus dipenuhi oleh gapoktan sebagai penerima dana bantuan pemerintah dengan yaitu, (1) memiliki legalitas, (2) berorientasi bisnis dan memiliki pengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan minimal tiga tahun, (3) memiliki AD/ART dan struktur organisasi; (4) memiliki penggilingan (*rice milling unit*) yang berstatus milik gapoktan atau milik anggota yang bermitra dengan gapoktan dalam kegiatan pengolahan beras, (5) diutamakan memiliki mesin pengering atau *dryer*, (6) mampu menyediakan gudang penyimpanan pangan dan aset pendukung lainnya. Selain kriteria yang harus dipenuhi, adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh gapoktan yaitu: (1) sanggup memasok bahan pangan secara berkelanjutan minimal dua TTI yang dinyatakan dalam kontrak kerjasama, (2) sanggup menjaga kualitas pasokan bahan pangan secara kontinyu, (3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan, (4) sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Kriteria yang harus dipenuhi Toko Tani Indonesia (TTI) yang akan menjadi pelaksana kegiatan atau sebagai mitra gapoktan yaitu: (1) pedagang tetap, (2) memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa, (3) berlokasi strategis yang mudah dijangkau konsumen, (4) memiliki SIUP/NPWP/UD (minimal surat izin usaha dari desa), (5) berpengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan minimal satu tahun, (6) tidak sedang bermasalah dalam hutang/piutang dengan pihak manapun. Selain kriteria yang harus dipenuhi, adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh Toko Tani Indonesia (TTI) yaitu sanggup melakukan kontrak kerjasama dengan gapoktan, dan sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik dalam menjual produk pangan TTI dan membuat catatan transaksi penjualan khusus (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

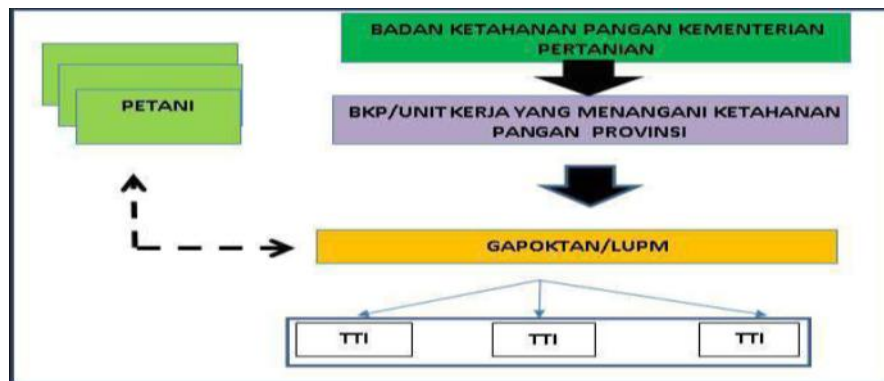
Hak atau fasilitas yang diberikan kepada gapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI) dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat (PUPM) oleh pemerintah yaitu: (1) penguatan kelembagaan gapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI) dalam rangka mendorong gapoktan menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri di kabupaten/kota dan Toko Tani Indonesia (TTI) menjadi sarana bagi konsumen untuk mengakses pangan dengan mudah pada harga yang wajar, (2) peningkatan kemampuan manajerial Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup perencanaan, penjualan, pembukuan kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI), dan pelaporan. Disamping itu, dari sisi gapoktan dilakukan peningkatan kemampuan manajerial, penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan, (3) pengembangan jejaring kemitraan usaha Toko Tani Indonesia (TTI) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Indikator keberhasilan dari program PUPM yang dibuat pemerintah meliputi indikator masukan yaitu dana bantuan pemerintah (banper), sasaran, pasokan yang berkelanjutan, pendampingan, pengawalan dan bimbingan teknis, indikator keluaran yaitu tersalurkannya dana banper, terlaksananya pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis, tercapainya stabilitas harga beras, dan indikator keberhasilan yaitu stabilitas pasokan dan harga pangan, posisi tawar petani meningkat, terbentuknya jaringan pemasaran bagi produsen/petani, kemudahan akses pangan masyarakat, konsumen memperoleh harga pangan yang wajar.

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dilaksanakan melalui dukungan dana APBN. Kegiatan ini dilaksanakan melalui alokasi dana badan ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian dalam bentuk dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan Provinsi. Dana yang dialokasikan tersebut, disalurkan kepada gapoktan dalam bentuk dana bantuan pemerintah untuk melakukan pembelian pangan pokok dan strategis dari petani atau mitra dan selanjutnya memasok pangan pokok dan strategis tersebut kepada Toko Tani Indonesia (TTI) untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang layak.

Berikut adalah alur mekanisme mengenai model Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).



Gambar 4. Mekanisme model Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Penetapan Harga Pangan yang perlu ditetapkan agar tujuan PUPM tercapai antara lain: (1) Harga beli di tingkat petani oleh Gapoktan. Penetapan Harga Pembelian Petani minimal sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan atau harga referensi untuk komoditas lainnya. (2) Harga jual TTI ke konsumen (HET). Harga jual TTI ditentukan berdasarkan harga beras rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir dengan mempertimbangkan juga harga gabah (GKP/GKG) rata-rata pada masa panen raya dan di luar masa panen. HET harus lebih rendah dari harga pasar dengan margin keuntungan pedagang TTI tidak boleh lebih dari 2.5% (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

C. Deskripsi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo melalui beberapa tahap yaitu:

1. Sosialisasi Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan pertama kali pada bulan Juni 2016, mengingat program Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan program baru kebijakan pemerintahan Kabinet Nawa Cita. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, Desa Mancasan merupakan satu-satunya desa yang terpilih untuk melaksanakan program PUPM. Adapun sasaran program tersebut adalah gapoktan sebagai organisasi tinggi petani tingkat desa. Selain itu adapun syarat dari program PUPM yaitu gapoktan yang telah memiliki *rice milling unit* (unit penggiling padi) secara mandiri atau milik anggota yang bermitra dengan gapoktan, diutamakan memiliki mesin pengering (*dryer*), dan mampu menyediakan gudang penyimpanan pangan dan aset pendukung lainnya, karena itulah Gapoktan Mumpuni Jaya Desa Mancasan terpilih untuk melaksanakan program tersebut pertama kalinya.

Kegiatan awal program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) diawali dengan sosialisasi nasional terkait program tersebut. Sosialisasi program tersebut dihadiri oleh tim pembina dari provinsi (Badan Ketahanan Pangan Provinsi), tim teknis dari kabupaten (Badan Ketahanan Pangan Kabupaten) dan perwakilan dari gapoktan diseluruh Indonesia. Dari Desa Mancasan sendiri hanya dihadiri oleh ketua gapoktan Desa Mancasan. Sosialisasi tingkat nasional tersebut diadakan di Nusadua, Provinsi Bali pada Mei 2016. Dari sosialisasi program PUPM tersebut, masing-masing ketua gapoktan dan tim teknis tingkat kabupaten (Badan Ketahanan Pangan Kabupaten) diwajibkan mensosialisasikan kepada petani anggota gapoktan di masing-masing desa yang telah terpilih untuk menjalankan program.

Kegiatan awal program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan adalah sosialisasi terkait program. Kegiatan sosialisai program diadakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo dan didampingi oleh penyuluh pertanian lapang di Balai Desa Mancasan pada Juni 2016. Peserta sosialisasi program PUPM dibatasi kuota 20 orang atau 5 orang disetiap kelompok tani di Desa Mancasan,

namun tidak semua hadir dalam sosialisasi tersebut hanya ada 17 peserta pada sosialisasi program PUPM di Desa Mancasan.

Materi pada sosialisasi program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) adalah informasi mengenai program, tujuan program, informasi pelaksanaan program seperti adanya kegiatan jual beli gabah dari petani petani anggota gapoktan kepada gapoktan, penggilingan gabah menjadi beras, pengemasan beras dan pemasaran produk beras ke Toko Tani Indonesia (TTI), informasi jumlah bantuan yang diberikan pemerintah kepada gapoktan pada program PUPM, dan manfaat yang diperoleh petani apabila terlibat dalam program PUPM seperti peningkatan pendapatan dengan harga tawar yang lebih tinggi dan tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat dengan beras bermutu baik dan harga yang terjangkau.

2. Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) terdiri dari jual beli gabah dari petani kepada gapoktan, penggilingan gabah menjadi beras, pengemasan produk beras dan distribusi produk ke Toko Tani Indonesia (TTI). Pada kegiatan jual beli gabah, petani anggota gapoktan disarankan untuk menjual hasil panen berupa gabah kepada gapoktan daripada ke tengkulak. Hal tersebut karena harga beli di tingkat petani oleh gapoktan ditetapkan sesuai dengan harga pembelian pemerintah yaitu penetapan harga pembelian pangan pokok strategis di tingkat petani yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada petani untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun ada salah satu syarat yang harus dipenuhi petani petani anggota gapoktan dalam menjual gabahnya ke gapoktan agar sesuai tujuan program, yaitu memenuhi kebutuhan pangan konsumen dengan beras yang kualitasnya baik dengan harga yang terjangkau. Adapun syarat bagi petani anggota gapoktan dalam menjual gabahnya ke

gapoktan, yaitu gabah yang diperkenankan adalah gabah kering giling (GKG) yang merupakan gabah yang sudah mengalami proses penjemuran, dengan kualitas kadar air sebesar 14% dan minimum kotoran 3% atau bisa dikatakan gabah tersebut dalam kualitas yang baik. GKG tersebut memiliki harga jual dari pemerintah (HPP), yaitu sebesar 4.300 rupiah/kg harga tersebut lebih tinggi dibanding menjualnya kepada tengkulak yang harganya 4.000 rupiah/kg.

Namun pada kenyataan yang terjadi di Desa Mancasan petani anggota gapoktan masih kurang keikutsertaannya pada pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) terutama pada saat jual beli gabah, hanya sekitar 5-8 orang saja yang biasanya menjual gabahnya ke gapoktan. Bahkan pada saat penelitian berlangsung, berdasarkan informasi yang didapatkan di lapang menyebutkan tidak ada satupun petani di Desa Mancasan yang menjual gabahnya ke gapoktan hal tersebut dikarenakan hasil panen yang kerap kali terserang hama maupun mengalami banjir beberapa waktu lalu saat musim hujan, menjadikan petani anggota gapoktan sulit mendapatkan rendemen yang baik. Selain itu mereka masih terbiasa menjualnya kepada tengkulak. Dari kejadian tersebut, gapoktan terpaksa memasok gabah dari petani lain di luar Desa Mancasan untuk memenuhi pasokan beras di Toko Tani Indonesia (TTI). Sementara untuk kegiatan pelaksanaan lainnya seperti proses penggilingan beras dan pengemasan, sebagian besar petani anggota gapoktan tidak terlalu ingin terlibat mengingat proses penggilingan beras dilaksanakan di gudang cadangan pangan milik seorang pengusaha beras, selain itu mereka lebih memilih fokus bekerja untuk mencari tambahan pendapatan, baik di sektor pertanian lain seperti beternak maupun sektor non pertanian. Begitu pula dengan kegiatan pemasaran, mereka tidak terlalu terlibat dalam hal tersebut karena mereka kurang tahu kapan produk beras akan dipasarkan. Selain itu, kegiatan pemasaran ke TTI dibantu oleh tenaga kerja yang berasal dari TTI.

Dari penjelasan diatas terkait pelaksanaan program PUPM yang terjadi di Desa Mancasan dapat diketahui bahwa banyak kendala yang terjadi seperti kegagalan panen akibat hama, rendemen yang kurang baik sehingga kualitas gabah menurun, dan ketidaktahuan petani anggota gapoktan terkait pelaksanaan penggilingan gabah, pengemasan, dan pemasaran produk. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Gapoktan Mumpuni Jaya Desa Mancasan untuk tetap ikut dalam program tersebut, karena apabila stok gabah yang akan diproduksi menjadi beras telah habis, gapoktan (pengurus) diperbolehkan membeli gabah dari petani lain selama petani tersebut masih dalam lingkup kabupaten yang sama. Hal ini tentu menjadi alasan agar program tersebut tetap berjalan sesuai alur, walaupun disatu sisi pengurus gapoktan harus bekerja keras demi keberlangsungan program PUPM.

3. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PUPM dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Monitoring dan evaluasi program PUPM di Desa Mancasan didampingi oleh tim teknis dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kegiatan yang termasuk pada monitoring dan evaluasi yaitu

1. Pembinaan oleh tim teknis kabupaten

Kegiatan pembinaan yang dilakukan di oleh tim teknis kabupaten bertujuan untuk memberikan informasi kepada petani di Desa Mancasan, terkait penyelesaian masalah yang terjadi pada pelaksanaan program PUPM. Kegiatan pembinaan diadakan sebulan sekali dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan pembinaan biasanya dilaksanakan bertepatan dengan diadakannya pertemuan rutin gapoktan. Kegiatan pembinaan program PUPM diadakan di Balai

Desa Mancasan dengan kouta peserta 20 orang. Pada saat kegiatan ini, tidak semua petani petani anggota gapoktan mengikuti, hanya sekitar 15 orang saja yang hadir dalam pembinaan program PUPM.

2. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim teknis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo kepada Gapoktan Mumpuni Jaya Desa Mancasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa segala kegiatan PUPM yang terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengawasan dan pengendalian biasanya bertepatan dngan pembinaan oleh tim teknis kabupaten yang dilaksanakan di Balai Desa Mancasan.

3. Pembukuan PUPM

Pembukuan PUPM dilakukan oleh pengurus gapoktan yaitu ketua, sekertaris dan bendahara. Hal-hal yang harus dibukukan yaitu : pembelian komoditas pokok yang berupa gabah kering giling (GKG) dari petani anggota gapoktan Desa Mancasan maupun petani selain dari Desa Mancasan yang menjadi mitra , pasokan /distribusi produk beras yang diproduksi gapoktan kepada Toko Tani Indonesia (TTI) dan permintaan pasokan dari TTI kepada gapoktan serta penjualan kepada konsumen, dan administrasi pengeluaran keuangan oleh gapoktan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan penyampaian informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Dalam hal ini Gapoktan Mumpuni Jaya Desa Mancasan harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dibukukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Sukoharjo). Pelaporan dilakukan secara berkala setiap minggu berdasarkan hasil penjualan produk di Toko Tani Indonesia (TTI). Pelaporan hasil pelaksanaan program PUPM yang dilakukan oleh gapoktan kepada tim teknis pendamping melaporkan secara tertulis perkembangan PUPM kepada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan dan laporan mingguan melalui sms center Kementerian Pertanian.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Anggota Gapoktan dalam Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

1. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan pendidikan diluar pendidikan formal yang merupakan keikutsertaan petani anggota gapoktan pada penyuluhan dan pelatihan dalam kurun waktu satu musim tanam.

Tabel 4.11 Distribusi responden berdasarkan pendidikan non formal

No	Penyuluhan dan pelatihan	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah (1-2 kali)	2,0 - 3,5	9	18,0
2	Rendah (3-4 kali)	3,6 - 5,1	27	54,0
3	Cukup (5-6 kali)	5,2 - 6,7	6	12,0
4	Tinggi (7-8 kali)	6,8 - 8,3	5	10,0
5	Sangat tinggi (>8 kali)	8,4 – 10,0	3	6,0
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pendidikan non formal yang berupa penyuluhan dan pelatihan pada sebagian besar responden adalah rendah yang ditunjukkan oleh 27 orang atau 54% yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan sejumlah 3-4 kali. Keikutsertaan petani anggota gapoktan yang tergolong rendah pada kegiatan penyuluhan dan pelatihan tersebut dikarenakan pada kegiatan-

kegiatan penyuluhan mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengikutinya, hal ini dikarenakan selain bertani sebagian dari mereka juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai tenaga kerja kerajinan alat musik gitar di Desa Mancasan Kecamatan Baki dan sebagai pegawai perusahaan di sekitar Solo Baru.

Selain hal tersebut, kegiatan-kegiatan penyuluhan maupun pelatihan di desa tersebut tidak terlalu banyak diadakan apalagi dalam kurun waktu satu tahun. Dalam kurun waktu satu tahun penyuluhan maupun pelatihan dalam bidang pertanian yang diadakan di Desa Mancasan hanya berkisar antara 4-5 kali saja, itupun tidak semua petani mengikutinya. Suhardiyono (1992), mengutip beberapa ahli penyuluhan menyatakan bahwa sasaran penyuluhan yang utama adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan praktis bagi masyarakat petani di pedesaan dan kehidupan pertaniannya. Namun pada kenyataan yang terjadi di Desa Mancasan penyuluhan pertanian yang masih jarang terjadi, menghambat penyebaran informasi dan inovasi pertanian yang seharusnya dapat diakses oleh petani khususnya petani anggota gapoktan. Sedangkan mereka yang intensitasnya mengikuti pendidikan non formal lebih dari 3-4 kali, merupakan responden yang aktif dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan di luar desa, kecamatan maupun kabupaten yang diadakan beberapa instansi seperti pertanian, ketahanan pangan maupun swasta.

2. Pendapatan

Pendapatan dalam penelitian ini dilihat dari selisih antara penerimaan dari usaha tani maupun non usaha tani yang diperoleh responden dengan biaya pengeluaran usahatani, non usaha tani dan pengeluaran rumah tangga dalam kurun satu musim tanam

Tabel 4.12 Distribusi responden berdasarkan pendapatan

No	Pendapatan	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah (< 1,5 juta)	1	11	22
2	Rendah (1,5 juta – 3 juta)	2	19	38
3	Cukup (3,1 juta – 4,5 juta)	3	8	16
4	Tinggi (4,6 juta – 6 juta)	4	8	16
5	Sangat tinggi (> 6 juta)	5	4	8
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan responden adalah rendah, yang ditunjukkan oleh 19 orang atau 38% dengan pendapatan sebesar 1,5 – 3 juta rupiah dalam satu musim tanam. Menurut Sukirno dalam Lumintang (2013), menyatakan bahwa pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.

Pada kenyataannya yang terjadi di Desa Mancasan, pendapatan yang diperoleh oleh sebagian besar petani anggota gapoktan di desa tersebut tergolong rendah. Hal ini dikarenakan terjadi kegagalan panen yang melanda Desa Mancasan pada pertengahan bulan april. Kegagalan panen tersebut disebabkan oleh serangan hama dan menyebabkan produksi padi di Desa Mancasan mengalami penurunan sehingga penerimaan dari usaha tani pun ikut merosot, selain itu biaya yang dikeluarkan petani untuk usaha tani tergolong tinggi, padahal luas lahan yang mereka usahakan termasuk dalam kategori sempit (<0,25 ha). Hal tersebut ditambah dengan angka tanggungan keluarga dan biaya pengeluaran rumah tangga petani yang juga cukup tinggi.

Adapun petani anggota gapoktan yang tergolong dalam pendapatan yang cukup hingga sangat tinggi (>3 juta) adalah petani petani anggota

gapoktan yang memiliki pekerjaan sampingan di luar sektor pertanian, seperti wirausaha, pegawai negeri, dan swasta. Biaya rumah tangga yang di keluarkan juga tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan tanggungan keluarga yang lebih sedikit, selain itu ada anggota keluarga yang bekerja merantau sehingga mengurangi beban pengeluaran mereka.

3. Keaktifan Anggota

Keaktifan anggota dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan petani anggota gapoktan mengikuti kegiatan rutin organisasi kelompok dan keikutsertaan dalam memberikan ide atau gagasan disetiap pertemuan rutin kelompok dalam kurun waktu satu musim tanam.

Tabel 4.13 Distribusi responden berdasarkan keaktifan anggota

No	Keaktifan Anggota	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah	3,0 – 5,3	2	4
2	Rendah	5,4 – 7,7	12	24
3	Cukup	7,8 – 10,1	21	42
4	Tinggi	10,2 – 12,5	1	2
5	Sangat tinggi	12,6 – 15,0	14	28
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar keaktifan anggota dari responden adalah cukup yang ditunjukkan oleh 21 orang atau 42% termasuk cukup aktif dalam mengikuti pertemuan rutin kelompok. Hal tersebut berarti sebagian besar petani petani anggota gapoktan di Desa Mancasan cukup antusias dalam mengikuti pertemuan rutin, seperti mengajukan ide/gagasan, bertanya mengenai berbagai masalah yang ada di bidang pertanian, dan mampu menerima berbagai ide/usulan dari anggota lainnya. Adapun sebagian dari keaktifan petani anggota gapoktan yang tergolong sangat rendah dan rendah dalam mengikuti pertemuan rutin, diartikan bahwa petani anggota gapoktan hanya akan bertanya atau mengajukan ide/gagasan apabila menyangkut keperluannya saja, bahkan petani anggota gapoktan ada yang tidak pernah bertanya mengenai masalah pertanian maupun

mengajukan ide/gagasan dan lebih senang mendengarkan ide/usulan anggota lainnya. yang dirasa sudah cukup mewakili dirinya pada saat pertemuan rutin.

Suwandari *et al* (2005) berpendapat bahwa aktifnya petani dalam keanggotaan kelompok tani akan meningkatkan motivasi untuk berproduksi lebih baik, bertukar informasi, dan dorongan penguasaan penerapan teknologi pertanian, sehingga dari pernyataan tersebut, petani anggota gapoktan yang keaktifan anggotanya tergolong tinggi hingga sangat tinggi dalam mengikuti pertemuan rutin adalah mereka yang mudah dalam bertukar informasi terkait bidang pertanian. Namun sebagian dari mereka ialah yang memiliki jabatan sebagai pengurus ataupun ketua karena mereka yang selalu mengemukakan gagasan dan memberikan berbagai solusi untuk menjawab permasalahan dari anggota lainnya.

4. Luas Lahan

Luas lahan dalam penelitian ini yaitu keseluruhan luas lahan yang diusahakan responden yang meliputi lahan milik sendiri, lahan sewa, lahan menyakap, dan lahan bengkok.

Tabel 4.14 Distribusi responden berdasarkan luas lahan

No	Luas Lahan	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	< 0,25 Ha	1	17	34
2	0,25 - 0,50 Ha	2	14	28
3	0,50 – 0,75 Ha	3	14	28
4	0,75 – 1,00 Ha	4	1	2
5	> 1,00 Ha	5	4	8
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar luas lahan dari responden adalah kurang dari 0,25 ha atau bisa dikatakan sempit. Hal ini ditunjukkan oleh 17 orang atau 34% responden yang memiliki luas lahan sempit kurang dari 0,25 ha. Sebagian besar responden hanya memiliki luas lahan berkisar antara 1-5

patok atau sekitar 0.04 – 0,2 ha. Sebagian dari mereka ada juga yang tidak memiliki luas lahan karena hanya bekerja sebagai buruh tani. Menurut Maleba *et al* (2015) luas lahan yang diusahakan petani akan mempengaruhi besarnya pendapatan petani itu sendiri. Apabila semakin besar lahan yang diusahakan oleh petani maka semakin besar pula jumlah produksi dan jumlah produksi pendapatan yang akan dihasilkan. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil pendapatan yang rendah di Desa Mancasan karena luas lahan yang diusahakan sebagian besar petani tergolong sempit. Sedangkan responden yang memiliki luas lahan yang tergolong kategori cukup hingga luas (0,5 ha hingga lebih dari 1 hektar) merupakan mereka yang memiliki beberapa lahan seperti lahan sewa, lahan menyakap maupun lahan bengkok. Selain itu, mereka juga memiliki lahan milik sendiri yang berada di beberapa dusun yang berbeda dengan tempat tinggal mereka.

5. Manajemen Kelompok

Manajemen Kelompok dalam penelitian ini berupa kepemimpinan yang merupakan kemampuan pemimpin dalam melibatkan anggota dalam berbagai kegiatan dari Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), regulasi atau aturan-aturan kelompok yang merupakan kesesuaian aturan di dalam kelompok, dan transparansi yang merupakan keterbukaan di dalam kelompok.

Tabel 4. 15 Distribusi responden berdasarkan manajemen kelompok yang meliputi kepemimpinan, regulasi dan transparansi

No	Keterangan	Skor	Kategori	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Kepemimpinan	10 – 18	Sangat Buruk	0	0
		19 - 26	Buruk	0	0
		27 – 34	Cukup	6	12
		35 – 42	Baik	43	86
		43 - 50	Sangat Baik	1	2
	Jumlah			50	100
2	Regulasi	3,0 – 5,3	Sangat Tidak Sesuai	0	0
		5,4 – 7,7	Tidak Sesuai	0	0
		7,8 – 10,1	Kurang Sesuai	4	8

		10,2 – 12,5	Sesuai	41	82
		12,6 – 15,0	Sangat Sesuai	5	10
		Jumlah		50	100
3	Transparansi	4,0 – 7,1	Sangat Buruk	0	0
		7,2 – 10,3	Buruk	0	0
		10,4 – 13,5	Cukup	13	26
		13,6 – 16,7	Baik	27	56
		16,8 – 20,0	Sangat Baik	10	20
		Jumlah		50	100
4	Manajemen Kelompok	17 – 30,5	Sangat Rendah	5	10
		30,6 – 44,1	Rendah	43	86
		44,2 – 57,7	Cukup	2	4
		57,8 – 71,3	Tinggi	0	0
		71,4 – 85,0	Sangat Tinggi	0	0
		Jumlah		50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

a. Kepemimpinan

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap kepemimpinan ketua gapoktan di dalam kelompok adalah baik yang ditunjukkan oleh 43 orang atau 86 %. Kepemimpinan yang tergolong baik dilihat dari kepemimpinan ketua gapoktan dalam melibatkan petani anggota gapoktan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program Pengembangan Usaa Pangan Masyarakat (PUPM). Andrew dan Dubrin (2006), mengungkapkan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai kekuatan yang dinamis dalam memotivasi dan mengkoordinasi anggota kelompoknya. Untuk itu, dukungan kepemimpinan dalam tercapainya sebuah tujuan sangat dibutuhkan baik oleh kelompok taninya maupun oleh anggota kelompok taninya. Namun masih ada sebagian kecil responden yang menganggap kepemimpinan ketua gapoktan hanya terbilang cukup, hal ini dikarenakan mereka sendiri tidak begitu dilibatkan dalam kegiatan program PUPM baik pada perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi program PUPM.

b. Regulasi

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa regulasi di dalam kelompok termasuk dalam kategori sesuai yang ditunjukkan oleh 41 orang atau 82 %. Responden beranggapan bahwa regulasi di dalam kelompok sesuai dengan norma yang ada di masyarakat desa dan kesepakatan anggota lainnya, sesuai dalam pertemuan rutin kelompok dan sesuai dalam penetapan iuran rutin kelompok. Namun masih ada sebagian kecil petani anggota gapoktan yang beranggapan bahwa regulasi di dalam kelompok nya kurang sesuai, hal ini dikarenakan mereka tidak terlalu mengetahui aturan-aturan yang berada dalam kelompok, karena sebagian peraturan atau regulasi tidak tertulis.

c. Transparansi

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa transparansi didalam kelompok termasuk dalam kategori baik yang ditunjukkan oleh 27 orang atau 56%. Hal ini dilihat dari keterbukaan komunikasi didalam kelompok, keterbukaan interaksi antar anggota dari kelompok lain dan keterbukaan akses informasi (terkait keuangan dalam kelompok maupun informasi dari penyuluhan pertanian) didalam kelompok terlihat baik, sehingga banyak responden beranggapan transparansi di dalam kelompoknya sudah saling terbuka antara anggota satu dengan yang lainnya. Namun ada sebagian dari responden yang menganggap bahwa transparansi hanya terbilang cukup, artinya keterbukaan komunikasi didalam kelompok, keterbukaan interaksi antar anggota dari kelompok lain dan keterbukaan akses informasi didalam kelompok tidak menyeluruh ke semua anggota kelompok. Hal ini dikarenakan perbedaan masing-masing individu dalam menerima informasi maupun dalam berkomunikasi.

d. Manajemen Kelompok

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas, manajemen kelompok termasuk dalam kategori tinggi menandakan manajemen kelompok yang ada di Gapoktan Mumpuni Jaya di Desa Mancasan Kecamatan Baki termasuk baik dalam segi kepemimpinan dan transparansi, sesuai dari segi regulasi. Hal ini ditunjukkan oleh 43 orang atau 86% menganggap bahwa manajemen yang berada pada kelompoknya termasuk dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini terbukti dari terpilihnya Gapoktan Mumpuni Jaya sebagai satu-satunya gapoktan yang mampu dan memenuhi syarat sebagai penerima program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

John Kotter dalam Robbins dan Timothy (2008), menjelaskan bahwa manajemen yang baik menghasilkan keteraturan dan konsistensi dengan cara mempersiapkan rencana formal, merancang struktur organisasi yang kuat dan memonitor hasil berdasarkan rencana. Manajemen kelompok yang terbilang tinggi atau baik menyebabkan keteraturan didalam kelompok tersebut. Keteraturan tersebut dapat dilihat dari kepemimpinan yang dinamis dan mampu memotivasi anggotanya, regulasi atau aturan yang dibuat sesuai dan teratur dengan kesepakatan anggota, serta transparansi atau keterbukaan yang dirasakan oleh anggota baik keterbukaan komunikasi, keuangan, maupun informasi. Namun walaupun begitu sebagian kecil saja yang memiliki anggapan bahwa manajemen kelompok di dalam kelompoknya terbilang cukup atau bisa dikatakan masih kurang baik. Hal tersebut terjadi karena tidak semua petani anggota selalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kelompok.

6. Budaya Organisasi

Budaya Organisasi di dalam penelitian ini adalah kebiasaan atau perilaku responden dalam mengambil resiko, kebiasaan dalam menerima

pembaharuan (inovasi), dan kebiasaan tepat waktu dalam mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan kelompok.

Tabel 4.16 Distribusi responden berdasarkan budaya organisasi

No	Budaya Organisasi	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat Buruk	5 – 8	0	0
2	Buruk	9 – 12	0	0
3	Cukup	13 – 16	3	6
4	Baik	17 – 20	28	56
5	Sangat Baik	21 – 25	19	38
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa budaya organisasi yang berada di dalam kelompok mereka adalah baik yang ditunjukkan oleh 28 orang atau 56% memiliki kebiasaan atau perilaku dalam mengambil resiko, memiliki kebiasaan dalam menerima pembaharuan (inovasi) dan memiliki kebiasaan tepat waktu dalam mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan kelompok. Budaya organisasi didalam penelitian ini tergolong pada kriteria baik, karena sebagian besar responden menganggap bahwa budaya organisasi yang melekat di lingkungan atau di desa mereka sesuai dengan pribadi dan memiliki karakteristik yang berbeda dari pada organisasi (gapoktan) lain. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari mereka terbiasa terdorong dalam menerima inovasi, seperti penggunaan teknologi alsintan dalam bertani, maupun kebiasaan mengambil resiko dalam usaha tani. Budaya organisasi yang diterapkan seperti sistem pola tanam yang sama antar anggota, walaupun hasil yang dicapai tidak maksimal namun hal tersebut sudah menjadi suatu budaya bagi petani anggota gapoktan di Desa Mancasan.

Stoner (1996) dalam Waridin dan Masrukhin (2006), mengungkapkan bahwa budaya organisasi atau *corporate culture* sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi

merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi anggota organisasi tersebut merasa berbeda dengan organisasi lain. Namun walaupun begitu sebagian kecil responden masih menganggap budaya organisasi di lingkungan atau di desa mereka kurang sesuai dengan diri pribadi masing-masing responden.

7. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam penelitian ini adalah sebagai fasilitator yang berperan dalam memberikan dana banper (bantuan pemerintah), dan fasilitator dalam memberikan pembinaan dan pendampingan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Tabel 4.17 Distribusi responden berdasarkan peran pemerintah

No	Peran Pemerintah	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat Buruk	4,0 – 7,1	0	0
2	Buruk	7,2 – 10,3	0	0
3	Cukup	10,4 – 13,5	0	0
4	Baik	13,6 – 16,7	35	70
5	Sangat Baik	16,8 – 20,0	15	30
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa peran pemerintah yang selama ini mereka rasakan termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan oleh 35 orang atau 70% menyatakan pemerintah berperan baik sebagai fasilitator pemberi dana dan fasilitator dalam memberikan pembinaan dan pendampingan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Peran pemerintah didalam penelitian ini termasuk dalam kategori baik hingga sangat baik karena seluruh responden menyatakan hal tersebut. Hal tersebut terjadi karena menurut mereka tanpa ada bantuan dari pemerintah, maka program tidak dapat berjalan dengan baik, selain itu adanya pembinaan dan pendampingan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dirasa memudahkan responden dalam menerima informasi-informasi terkait program

tersebut. Pamudji (1992), menambahkan bahwa pemerintah harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisor (memberi bimbingan), katalisator (mendorong laju pembangunan), maupun sebagai pelopor (mengayomi masyarakat) dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan partisipasi penuh dari masyarakat.

E. Partisipasi Petani Anggota Gapoktan dalam Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

1. Partisipasi Tahap Perencanaan

Partisipasi pada tahap perencanaan dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan petani gapoktan dalam tahap perencanaan yang meliputi pengambilan keputusan, intensitas dalam menghadiri rapat rutin perencanaan program, intensitas dalam mengajukan ide atau gagasan pada rapat program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Tabel 4.18 Distribusi partisipasi tahap perencanaan

No	Partisipasi tahap perencanaan	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah	4,0 – 7,1	2	4,0
2	Rendah	7,2 – 10,3	8	16,0
3	Cukup	10,4 – 13,5	17	34,0
4	Tinggi	13,6 – 16,7	11	22,0
5	Sangat tinggi	16,8 – 20,0	12	24,0
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada partisipasi tahap perencanaan adalah cukup. Hal ini ditunjukkan oleh 17 orang atau 34% responden yang cukup terlibat dalam perencanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Partisipasi tahap perencanaan pada penelitian ini dilihat dari keikutsertaan responden dalam berbagai kegiatan PUPM seperti keikutsertaan dalam mengambil keputusan mengikuti program, ikut serta dan terlibat mengikuti rapat rutin program PUPM, ikut terlibat dalam menyampaikan ide/gagasan dalam rapat rutin program PUPM. Partisipasi petani anggota gapoktan terbilang cukup dikarenakan tidak

semua petani anggota gapoktan diundang untuk menghadiri rapat rutin tersebut. Rapat rutin program PUPM hanya dibatasi 20 orang saja, yang diambil hanya 5 orang dari masing-masing kelompok tani setiap diadakan rapat rutin program PUPM. Selain itu, mereka tidak banyak dalam memberikan ide maupun gagasan terhadap rencana pelaksanaan dari program PUPM. Sedangkan mereka yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi yang terlibat dalam perencanaan program PUPM adalah pengurus dari beberapa kelompok tani maupun pengurus gapoktan yang dipastikan menghadiri rapat tersebut.

2. Partisipasi Tahap Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap pelaksanaan pada penelitian ini yaitu keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), yang meliputi keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam mengikuti setiap kegiatan dari program PUPM, seperti keterlibatan dalam jual beli gabah, penggilingan gabah menjadi beras, pengemasan beras, dan distribusi atau pemasaran produk ke Toko Tani Indonesia.

Tabel 4.19 Distribusi partisipasi tahap pelaksanaan

No	Partisipasi tahap pelaksanaan	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah	4,0 – 7,1	22	44,0
2	Rendah	7,2 – 10,3	19	38,0
3	Cukup	10,4 – 13,5	6	12,0
4	Tinggi	13,6 – 16,7	2	4,0
5	Sangat tinggi	16,8 – 20,0	1	2,0
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada partisipasi tahap pelaksanaan adalah sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh 22 orang atau 44% responden tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan program PUPM. Partisipasi tahap pelaksanaan program PUPM pada penelitian ini dilihat dari keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam jual beli gabah, penggilingan gabah menjadi beras, pengemasan beras, dan distribusi atau

pemasaran produk ke Toko Tani Indonesia (TTI). Partisipasi petani anggota gapoktan terbilang sangat rendah, dikarenakan pada saat penelitian berlangsung, produksi padi yang ada di Desa Mancasan merosot akibat gagal panen karena serangan hama. Hal tersebut menyebabkan petani anggota gapoktan tidak memperoleh hasil produksi yang banyak dan kualitasnya buruk sehingga tidak menjualnya ke gapoktan. Alasan lainnya, karena beras yang dijual atau dipasok ke gapoktan haruslah dengan kualitas yang bagus, sementara hasil produksi gabah mereka kebanyakan kurang baik sehingga mereka lebih memilih menjualnya ke tengkulak.

Pelaksanaan kegiatan lainnya seperti penggilingan gabah menjadi beras, pengemasan beras dan distribusi atau pemasaran ke Toko Tani Indonesia (TTI), lebih sering dilakukan oleh mereka yang bersangkutan dengan program tersebut yaitu oleh pengurus-pengurus gapoktan dan beberapa tenaga kerja TTI. Pendistribusian beras ke TT sendiri berjarak kurang lebih 5 km dari desa. Toko Tani Indonesia (TTI) di Kabupaten Sukoharjo terletak di Pasar Ir. Soekarno yang berada di pusat Kota Sukoharjo.

Sementara petani anggota gapoktan yang termasuk kedalam kategori cukup hingga tinggi dalam pelaksanaan program PUPM adalah mereka yang memang terkadang atau sering memasok gabah mereka ke gapoktan, karena sering dipilih sebagai pemasok dalam menjual gabahnya kepada gapoktan. Petani anggota gapoktan yang terpilih merupakan petani anggota yang memiliki hasil produksi padi dengan kualitas yang baik. Selain itu ada pengurus-pengurus gapoktan yang memang harus terlibat dalam pelaksanaan program PUPM, seperti pada kegiatan pengemasan dan distribusi beras ke Toko Tani Indonesia (TTI). Sementara untuk kategori sangat tinggi yaitu merupakan petani anggota gapoktan pemilik *rice milling unit* dan gudang penyimpanan cadangan makanan yang bermitra dengan gapoktan sehingga selalu terlibat pada

pelaksanaan program PUPM baik penggilingan, pengemasan maupun distribusi ke Toko Tani Indonesia.

3. Partisipasi Tahap Pemanfaatan Hasil

Partisipasi tahap pemanfaatan hasil dalam penelitian ini yaitu sejauh mana responden merasakan manfaat dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pangan dengan harga jual yang relatif rendah, dan petani anggota gapoktan memperoleh harga produksi yang lebih baik yang bisa menaikkan pendapatan.

Tabel 4.20 Distribusi partisipasi tahap pemanfaatan hasil

No	Partisipasi tahap pemanfaatan hasil	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah	3,0 – 5,3	12	24,0
2	Rendah	5,4 – 7,7	14	28,0
3	Cukup	7,8 – 10,1	18	36,0
4	Tinggi	10,2 – 12,5	6	12,0
5	Sangat tinggi	12,6 – 15,0	0	0
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada partisipasi tahap pemanfaatan hasil adalah cukup. Hal ini ditunjukkan oleh 18 orang atau 36% responden cukup terlibat dalam pemanfaatan hasil program PUPM. Partisipasi tahap pemanfaatan hasil pada penelitian ini, dilihat dari keikutsertaan petani anggota gapoktan dalam memanfaatkan hasil program PUPM, seperti terpenuhinya kebutuhan pangan dengan harga jual yang relatif rendah, dan memperoleh harga produksi gabah yang lebih baik yang dapat menaikkan pendapatan. Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil terbilang cukup, dikarenakan tidak semua petani anggota gapoktan mengambil manfaat dari program PUPM seperti halnya dalam jual beli gabah, mereka mampu memperoleh nilai harga jual gabah yang lebih tinggi, namun karena mereka sendiri jarang memasok gabah mereka ke gapoktan maka, manfaat tersebut tidak mereka peroleh.

Sementara pemanfaatan hasil dari program PUPM lainnya seperti terpenuhinya kebutuhan pangan responden dengan harga terjangkau juga cukup dimanfaatkan oleh sebagian responden. Gapoktan sendiri memasok sebagian beras hasil produk PUPM untuk desa sebelum di jual ke Toko Tani Indonesia, sehingga baik petani anggota gapoktan maupun warga desa bisa membeli beras dengan harga terjangkau, tanpa membelinya terlebih dahulu ke Toko Tani Indonesia (TTI) yang berada jauh dari desa. Berbeda dengan responden yang termasuk dalam kategori tinggi, mereka lebih sering memperoleh manfaat dari program PUPM karena sebagian dari mereka walaupun hanya kadang-kadang mengikuti pelaksanaan dari program PUPM, namun lebih sering mengambil manfaat yang berupa kebutuhan pangan beras dengan harga yang murah dan harga penjualan gabah yang lebih baik atau tinggi karena petani anggota langsung menjualnya ke gapoktan tanpa melalui tengkulak. Harga yang dijual ke tengkulak Rp 4000/kg sedangkan harga jual untuk gapoktan adalah Rp 4300/kg sehingga apabila petani menjual gabahnya lebih banyak maka keuntungan yang dihasilkan lebih tinggi, dibandingkan menjualnya ke tengkulak, sehingga mampu menaikkan pendapatannya.

Sementara responden petani anggota gapoktan, yang termasuk dalam kategori rendah maupun sangat rendah dari keterlibatannya dalam pemanfaatan hasil program PUPM adalah mereka yang jarang maupun tidak pernah dalam memanfaatkan hasil program PUPM. Hal ini dikarenakan, sebagian dari mereka memasok beras sendiri untuk kebutuhan rumah tangga yang berasal dari hasil panen yang telah ditebaskan oleh orang lain, sehingga mereka kurang atau tidak memanfaatkan hasil dari program PUPM berupa pembelian beras dengan harga yang murah maupun mendapatkan harga jual gabah yang lebih tinggi.

4. Partisipasi Tahap Evaluasi

Partisipasi pada tahap evaluasi pada penelitian ini yaitu keikutsertaan responden dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap pelaksanaan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Tabel 4.21 Distribusi partisipasi tahap evaluasi

No	Partisipasi tahap pemanfaatan hasil	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah	3,0 – 5,3	9	18,0
2	Rendah	5,4 – 7,7	21	42,0
3	Cukup	7,8 – 10,1	19	38,0
4	Tinggi	10,2 – 12,5	1	2,0
5	Sangat tinggi	12,6 – 15,0	0	0
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada partisipasi tahap evaluasi adalah rendah. Hal ini ditunjukkan oleh 21 orang atau 42% responden termasuk kategori jarang terlibat dalam evaluasi program PUPM. Partisipasi tahap evaluasi pada penelitian ini dilihat dari keikutsertaan responden dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap pelaksanaan program PUPM.

Partisipasi pada tahap evaluasi terbilang rendah, dikarenakan pada rapat evaluasi program secara terbuka untuk petani anggota gapoktan jarang dilaksanakan, sehingga banyak anggota yang kurang mengetahui informasi terkait pencapaian hasil dan belum bisa memberikan saran atau masukan terhadap pencapaian dari program PUPM. Sementara responden yang termasuk dalam kategori cukup hingga tinggi, yaitu petani anggota gapoktan maupun pengurus yang terkadang atau sering terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan PUPM. Adapun pengawasan Program PUPM yang dilakukan oleh petani anggota maupun pengurus gapoktan yang terlibat diantaranya, membuat laporan akhir dari kegiatan pelaksanaan program PUPM dari mulai perencanaan anggaran dana untuk pembelian gabah, biaya pengemasan, perolehan pendapatan dari penjualan di Toko Tani Indonesia (TTI) yang diterima oleh gapoktan.

Hal tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.

5. Partisipasi Petani Anggota Gapoktan dalam Program PUPM

Partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM adalah partisipasi secara keseluruhan yang dilihat dari partisipasi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM.

Tabel 4.22 Distribusi partisipasi petani anggota gapoktan

No	Partisipasi petani anggota gapoktan	Skor	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Sangat rendah	14,0 – 25,2	3	6,0
2	Rendah	25,3 – 36,4	22	44,0
3	Cukup	36,5 – 47,6	23	46,0
4	Tinggi	47,7 – 58,8	2	4,0
5	Sangat tinggi	58,9 – 70,0	0	0
Jumlah			50	100

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM secara keseluruhan adalah cukup. Hal ini ditunjukkan oleh 23 orang atau 46% termasuk dalam kategori cukup terlibat dalam seluruh kegiatan program PUPM dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM secara keseluruhan yang terbilang cukup menunjukkan bahwa petani anggota gapoktan mampu terlibat dalam seluruh kegiatan program PUPM, walaupun pada pelaksanaan program PUPM tergolong sangat rendah dan pada evaluasi program tergolong rendah, namun pada perencanaan dan pemanfaatan hasil petani anggota gapoktan sudah cukup terlibat.

Menurut Aref (2011) yang mengutip pendapat dari Subedi (2008) dan Aref *et al* (2010) mengemukakan bahwa, partisipasi petani menjadi faktor penting untuk keberlanjutan pertanian di area pedesaan. Persoalan partisipasi petani diberbagai daerah menjadi perhatian tingkat nasional

maupun tingkat daerah. Tanpa partisipasi tentunya tidak ada perkumpulan, tidak ada pembangunan dan tidak ada program. Oleh karena itu, kurangnya partisipasi dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan kebijakan pertanian dapat dengan mudah menjadi kegagalan dalam pembangunan pertanian. Dalam mempelajari ini, partisipasi digunakan dengan melibatkan petani dalam membuat keputusan dengan bekerjasama dan berinteraksi dengan organisasi pertanian.

Dari pernyataan tersebut dapat dikaitkan bahwa, partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM di Desa Mancasan yang masih termasuk dalam kategori cukup, atau bisa dikatakan partisipasinya kurang. Hal tersebut dikarenakan selisih antara kategori rendah dan cukup hanya sedikit, sehingga program PUPM memiliki hambatan dalam seluruh kegiatan pelaksanaannya seperti pada saat proses jual beli gabah, petani anggota gapoktan Desa Mancasan yang tidak memasok gabahnya ke Gapoktan Mumpuni Jaya, menyebabkan gapoktan harus mencari mitra lain di luar desa agar produksi pasokan di Toko Tani Indonesia (TTI) tetap tersedia. Hal tersebut menjadikan biaya pengeluaran lebih besar terutama untuk transportasi, sehingga penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang. Hal tersebut menjadi salah satu yang menyebabkan gapoktan mengalami kerugian dalam penjualan beras di Toko Tani Indonesia (TTI). Selain itu, kurangnya keterlibatan petani anggota dalam program PUPM pada saat evaluasi menghambat proses pelaporan atau pengadiministrasian pada evaluasi program karena kurangnya bantuan dari petani anggota gapoktan.

F. Pengaruh Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Anggota Gapoktan dalam Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

1. Model Persamaan Regresi Partisipasi Petani anggota gapoktan dalam Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi linier berganda, maka didapatkan model persamaan yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.23 Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

<i>Unstandardized Coefficient Standardized Coefficient</i>					
Model	B	Std Error	Beta	t	Sig
<i>(Constant)</i>	26,752	5,201		9,706	0,000
Pendidikan Non Formal	0,453	0,262	0,239	1,731	0,083
Pendapatan	1,710	0,485	0,487	3,529	0,000
Keaktifan Anggota	-0,543	0,461	-0,176	-1,179	0,238
Luas Lahan	-2,281	1,315	-0,172	-1,735	0,083
Manajemen Kelompok	0,201	0,151	0,209	1,333	0,182
Budaya Organisasi	-0,662	0,383	-0,260	-1,728	0,084
Peran Pemerintah	0,521	0,497	0,149	1,051	0,293

Sumber : Analisis data primer 2017

Persamaan model regresi pada analisis koefisien regresi linier berganda adalah :

$$Y = 26,752 + 0,453 + 1,710 - 0,543 - 2,281 + 0,201 - 0,662 + 0,521$$

Keterangan :

Y : Partisipasi Petani anggota gapoktan

X₁ : Pendidikan Non Formal

X₂ : Pendapatan

X₃ : Keaktifan Anggota

X₄ : Luas Lahan

X₅ : Manajemen Kelompok

X₆ : Budaya Organisasi

X₇ : Peran Pemerintah

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai koefisien pendidikan non formal untuk variabel X₁ sebesar 0,453, artinya setiap kenaikan pendidikan non formal satu satuan maka

variabel partisipasi akan naik sebesar 0,453 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

- b. Nilai koefisien pendapatan untuk variabel X_2 sebesar 1,710, artinya setiap kenaikan pendapatan satu satuan maka variabel partisipasi akan naik sebesar 1,710 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- c. Nilai koefisien keaktifan anggota untuk variabel X_3 sebesar 0,543, artinya setiap kenaikan satu satuan maka variabel partisipasi akan turun sebesar 0,543 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- d. Nilai koefisien luas lahan untuk variabel X_4 sebesar 2,281, artinya setiap kenaikan luas lahan satu satuan maka variabel partisipasi akan turun sebesar 2,281 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- e. Nilai koefisien manajemen kelompok untuk variabel X_5 sebesar 0,201, artinya setiap kenaikan pendidikan non formal satu satuan maka variabel partisipasi akan naik sebesar 0,201 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- f. Nilai koefisien budaya organisasi untuk variabel X_6 sebesar 0,662, artinya setiap kenaikan budaya satu satuan maka variabel partisipasi akan turun sebesar 0,662 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
- g. Nilai koefisien peran pemerintah untuk variabel X_7 sebesar 0,521, artinya setiap kenaikan pemerintah satu satuan maka variabel partisipasi akan naik sebesar 0,521 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya. Ghozali (2011), menjelaskan Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R Square menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R Square dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24 Hasil Uji Model Summary Nilai R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	0,558	0,321	0,197	6,57206

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari hasil analisis pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai R Square adalah 0,321. Artinya, variabel independen seperti pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi dan peran pemerintah menjelaskan variabel dependen (partisipasi petani anggota gapoktan) sebesar 32,1%, Nilai (R^2) yang kecil pada hasil analisis koefisien determinasi menjelaskan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, sedangkan sisanya 67,9 % diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Slamet (1992), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi diantaranya psikologi individu, ketrampilan, permodalan yang dimiliki, teknologi, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, selain itu Hubeis (1988), menyatakan bahwa selain faktor ekonomi dan sosial budaya, faktor lain yang mempengaruhi partisipasi adalah geografi, ekologi dan faktor personal partisipan. Sajogyo (1982) juga berpendapat bahwa motivasi juga dapat mempengaruhi

partisipasi seseorang, motivasi yang dimaksudkan yaitu dorongan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Uji Simultan (*F-test*)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen pendidikan non formal (X_1), pendapatan (X_2), keaktifan anggota (X_3), luas lahan (X_4), manajemen kelompok (X_5), budaya organisasi (X_6), peran pemerintah (X_7) benar-benar berpengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel dependen (partisipasi petani anggota gapoktan).

Tabel 4.25 Hasil Uji Simultan (Uji F) terhadap variabel Y

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Regression	820,92	7	117,27	2,715	0,020
Residu	1814,0	42	43,191		
Total	2634,9	49	53,774		

Sumber : Analisis data primer 2017

Hasil uji F yang ditunjukkan pada tabel diatas, didapatkan hasil nilai F hitung 2,715 dengan nilai probabilitas (p value) sebesar 0,020 dan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$). Sehingga , p value $\leq \alpha$ atau $0,020 \leq 0,05$. Berdasarkan perbandingan tersebut maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen pendidikan non formal (X_1), pendapatan (X_2), keaktifan anggota (X_3), luas lahan (X_4), manajemen kelompok (X_5), budaya organisasi (X_6), peran pemerintah (X_7) yang mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen partisipasi petani anggota gapoktan (Y).

4. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

Tabel 4.26 Hasil Uji Parsial (Uji t) terhadap variabel Y (Partisipasi)

Variabel	OLS		Depvar*	
	Coefficient	P-value	Coefficient	P value
(Constant)	27,129	0,000	26,752	0,000
Pendidikan Non Formal (X_1)	0,565	0,075*	0,453	0,083*
Pendapatan (X_2)	1,711	0,002**	1,710	0,000***
Keaktifan Anggota (X_3)	-0,666	0,231	-0,543	0,238
Luas Lahan (X_4)	-2,537	0,156	-2,281	0,083*
Manajemen Kelompok (X_5)	0,203	0,247	0,201	0,182
Budaya Organisasi (X_6)	-0,615	0,150	-0,662	0,084*
Peran Pemerintah (X_7)	0,414	0,467	0,521	0,293

Keterangan :

Depvar* = Model Heterokedastisitas

*) = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 90%

**) = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 95%

***) = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 99%

Sumber : Analisis data primer 2017

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis OLS, memperoleh dua variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal ini ditindaklanjuti dengan menganalisis lebih lanjut dengan model heterokedastisitas, yang ternyata setelah penerapan diatas, diperoleh 4 variabel berpengaruh nyata sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pendidikan Non Formal (X_1) terhadap Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

Pada model heterokedastisitas, p value atau sig pada variabel (X_1), sebesar 0,083. P value < α yaitu $0,083 < 0,10$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, pendidikan non formal secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dengan tingkat kepercayaan 90%. Nilai koefisien regresi pada variabel pendidikan non formal bernilai positif sebesar 0,453 artinya semakin tinggi pendidikan non formal maka diikuti dengan semakin tinggi pula partisipasi petani anggota gapoktan

dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori setiana (2005) yang menyatakan bahwa penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuai program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh petani, sehingga program-program masyarakat yang disusun dengan baik akan berhasil dan masyarakat berpartisipasi di dalamnya. Pada kondisi yang ada pada penelitian ini, pendidikan non formal termasuk dalam kategori rendah, hal ini dikarenakan penyuluhan maupun pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terkait program-program pertanian yang diadakan di Desa Mancasan termasuk jarang, sehingga pendidikan non formal yang masih kurang diterima oleh petani anggota gapoktan mengakibatkan kurangnya penyebaran informasi maupun inovasi terkait program-program pertanian, termasuk program PUPM. Adapaun hal lain yang menyebabkan pendidikan non formal rendah yaitu petani anggota gapoktan selain bekerja di sektor pertanian, mereka juga bekerja di luar sektor pertanian, sehingga karena kurangnya informasi dari pendidikan non formal (penyuluhan dan pelatihan) tersebut menyebabkan partisipasi dari petani anggota gapoktan dalam mengikuti program-program pemerintah termasuk rendah begitu pula pada kegiatan program PUPM.

b. Pengaruh Pendapatan (X_2) terhadap Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

Pada model heterokedastisitas, p value atau sig pada variabel X_2 sebesar 0,000. p value $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,01$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, pendapatan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dengan tingkat kepercayaan 99%. Nilai koefisien regresi pada variabel pendapatan bernilai positif sebesar 1,710 artinya semakin tinggi pendapatan maka diikuti dengan semakin tinggi pula partisipasi petani

anggota gapoktan dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mardikanto (1994), yang mengemukakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi adalah tingkat kemampuan ekonomi seseorang yang secara ekonomi mampu, dengan kata lain tingkat pendapatan tinggi, akan lebih mudah menyediakan modal untuk berpartisipasi. Soekartawi (1988) menambahkan bahwa petani dengan tingkat pendapatan tinggi akan lebih mudah melakukan sesuatu yang diinginkan sehingga akan lebih aktif dalam berpartisipasi dibandingkan dengan petani yang berpendapatan rendah. Sedangkan petani yang berpendapatan rendah akan cenderung pasif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pendapatan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi, yang berarti semakin tinggi pendapatan petani anggota gapoktan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya, namun yang terjadi adalah sebaliknya, tingkat pendapatan petani di Desa Mancasan tergolong rendah sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM yang bisa dikatakan cukup rendah. Pendapatan petani anggota gapoktan yang rendah disebabkan karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga menyebabkan mereka harus memenuhi kebutuhan hidup termasuk dari sektor non pertanian, sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam program-program pertanian lainnya termasuk program PUPM. Padahal jika mereka berpartisipasi dalam program PUPM terutama pada pelaksanaan program PUPM seperti menjual gabah kepada gapoktan, mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik dibandingkan menjualnya ke tengkulak. Namun karena kendala mereka adalah hasil produksi gabah yang kurang baik pada saat pasca panen, menyebabkan petani anggota gapoktan tidak bisa memasok atau menjual gabahnya ke gapoktan,

sehingga mereka tidak selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan program PUPM.

c. Pengaruh Keaktifan Anggota (X_3) terhadap Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

Pada model heterokedastisitas, p value atau sig pada variabel X_3 sebesar 0,238. p value $> \alpha$ yaitu $0,238 > 0,10$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, keaktifan anggota secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dengan tingkat kepercayaan 90%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin aktif atau tidak aktifnya anggota tidak berpengaruh nyata terhadap besarnya tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Maleba *et al* (2005), yang mengemukakan bahwa partisipasi anggota dalam pengembangan kelompok tani dilihat dari keaktifan anggota seperti kehadiran dalam penyusunan program, keaktifan memberi masukan atau pendapat dalam penyusunan program, keaktifan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok, keaktifan evaluasi Program dalam kelompok dan keaktifan dalam memberi masukan atau pendapat dalam evaluasi.

Berdasarkan kondisi di Desa Mancasan keaktifan petani anggota gapoktan tergolong cukup, namun dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa aktif atau tidaknya anggota tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam mengikuti program PUPM. Hal ini terjadi karena kendala yang ada pada diri mereka seperti kurangnya keinginan mereka untuk ikut serta dalam program PUPM karena kesibukan masing-masing di sektor non pertanian. Selain itu mereka yang aktif di dalam kelompok kurang memiliki informasi terkait program PUPM dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi sehingga menyebabkan mereka kurang mengerti dengan tujuan program PUPM tersebut. Selain itu, mereka yang aktif

di kelompok karena untuk kepentingan mereka sendiri terutama dalam usaha tani. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktif atau tidaknya petani anggota gapoktan dalam kelompok tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM.

d. Pengaruh Luas Lahan (X_4) terhadap Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

Pada model heterokedastisitas, p value atau sig pada variabel X_4 sebesar 0,083. p value $< \alpha$ yaitu $0,083 < 0,10$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, luas penguasaan lahan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dengan tingkat kepercayaan 90%. Nilai koefisien regresi pada variabel pendapatan bernilai negatif sebesar -2,281 artinya semakin luas penguasaan lahan maka tidak diikuti dengan tingginya partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Supriyati *et al* (2004), yang menyebutkan lahan merupakan asset utama bagi masyarakat pedesaan dan kepemilikan lahan akan menentukan status sosial pemiliknya, semakin luas lahan yang dimiliki semakin tinggi status sosialnya sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Nilai koefisien pada model regresi yang negatif yaitu -2,281 dapat diartikan bahwa kenaikan luas lahan tidak diikuti dengan semakin tingginya partisipasi. Berdasarkan kondisi di Desa Mancasan, luas lahan yang dimiliki sebagian besar petani anggota gapoktan termasuk dalam kategori sangat rendah yaitu kurang dari 0,25 ha atau berkisar antara 0,04-0,2 ha. Hal ini tersebut menandakan bahwa produktivitas padi lebih sedikit, sehingga mereka lebih memilih memasok beras untuk keluarga sendiri dibandingkan menjualnya ke gapoktan. Selain itu gagalnya panen yang melanda hampir semua areal persawahan di Desa Mancasan, menyebabkan

hampir semua petani merugi akibat hasil produktivitas padi menurun drastis.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Mancasan, luasnya penguasaan lahan petani anggota gapoktan, apabila hasil produktivitas padinya kurang baik, maka hasil tersebut tidak dapat dijual atau dipasok ke gapoktan. Hasil produktivitas padi ini lah alasan utama petani anggota gapoktan tidak bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan Program PUPM terutama dalam proses penjualan gabah kepada gapoktan, karena gabah yang dijual harus memenuhi syarat kualitas yang baik.

e. Pengaruh Manajemen Kelompok (X_5) terhadap Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

Pada model heterokedastisitas, p value atau sig pada variabel X_5 sebesar 0,182. p value $> \alpha$ yaitu $0,182 > 0,10$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, manajemen kelompok secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dengan tingkat kepercayaan 90% . Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik atau tidaknya manajemen didalam kelompok tidak berpengaruh dengan besarnya tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori John Kotter dalam Robbins dan Timothy (2008), yang menyatakan bahwa manajemen yang baik menghasilkan keteraturan dan konsistensi. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Desa Mancasan, manajemen kelompok terbilang baik atau tergolong tinggi. Namun jika dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa baik atau tidaknya manajemen kelompok di dalam kelompok tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM.. Manajemen kelompok dalam penelitian ini terdiri dari kepemimpinan,

regulasi dan transparansi, yang secara keseluruhan terbilang baik atau tinggi.

Kepemimpinan ketua gapoktan dalam melibatkan petani anggota gapoktan dalam program PUPM pun sudah terbilang baik, selain itu ketua gapoktan sudah dianggap sebagai guru oleh anggotanya karena pernah menjadi penyuluh swadaya. Regulasi dan transparansi juga terbilang sesuai dengan kesepakatan anggota lainnya dan saling terbuka antar anggota, terbukti bahwa setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan kelompok setidaknya dua kali untuk membahas permasalahan bersama, sehingga dapat dikatakan regulasi dan transparansi berjalan dengan baik.

Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM. Hal ini terjadi karena manajemen kelompok yang terdiri dari kepemimpinan, transparansi dan regulasi walaupun sudah terbilang baik, namun di dalam kelompok terkadang terdapat kesenjangan antara anggota dan pengurus. Petani anggota gapoktan menganggap dan mempercayakan pengurus lebih berkepentingan untuk mengurus program-program yang berasal dari pemerintah dibanding dirinya, sehingga hampir semua program pertanian termasuk PUPM lebih banyak dikelola oleh pengurus. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya manajemen kelompok di dalam gapoktan tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM.

f. Pengaruh Budaya Organisasi (X_6) terhadap Partisipasi Petani Anggota Gapoktan

Pada model heterokedastisitas, p value atau sig pada variabel X_6 sebesar 0,084. p value $< \alpha$ yaitu $0,084 < 0,10$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, budaya organisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dengan tingkat kepercayaan 90%. Nilai koefisien regresi pada variabel

pendidikan non formal bernilai negatif sebesar $-0,662$ artinya semakin baik budaya organisasi tidak diikuti dengan tingginya partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Hofstede dalam Supomo dan Indriantoro (1998), yang menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, untuk menyelesaikan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam hubungannya dengan partisipasi, keterlibatan merupakan faktor kunci dari budaya organisasi untuk menciptakan keefektifan. Organisasi dengan tingkat keikutsertaan, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dapat bergantung pada sistem manajemen yang terbentuk berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama. Budaya organisasi yang kuat dan tingkat partisipasi tinggi yang dianut pihak manajer secara konsisten maka hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan kinerja yang unggul.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang berada pada Gapoktan Mumpuni Jaya termasuk dalam kategori baik, karena petani anggota gapoktan memiliki kebiasaan atau perilaku dalam mengambil resiko, memiliki kebiasaan dalam menerima pembaharuan (inovasi) dan memiliki kebiasaan tepat waktu dalam mengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan kelompok yang mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap partisipasi anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM. Namun pada penelitian ini, nilai koefisien pada model regresi bernilai negatif yaitu $-0,662$ yang berarti semakin baik budaya organisasi tidak diikuti dengan semakin baiknya partisipasi anggota gapoktan dalam program PUPM. Hal tersebut terjadi karena budaya organisasi di Gapoktan Mumpuni Jaya memiliki nilai-nilai yang kuat, sehingga apabila tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut, maka hal tersebut harus ditinggalkan seperti contohnya dalam pola tanam, walaupun produktivitas dari pola

tanam yang diterapkan tidak memaksimalkan hasil, namun hal tersebut telah menjadi budaya yang tidak dapat ditinggalkan. Produktivitas padi yang hasilnya kurang maksimal akibat pola tanam inilah yang menjadi kan petani kurang berminat untuk memasok gabahnya kepada gapoktan sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk tidak ikut serta dalam mengikuti program PUPM terutama dalam pelaksanaan program PUPM sehingga dapat dikatakan budaya organisasi yang baik, tidak diikuti dengan semakin baiknya partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM.

g. Pengaruh Peran Pemerintah (X_7) terhadap Partisipasi Petani anggota gapoktan

Pada model heterokedastisitas, p value atau sig pada variabel X_7 sebesar 0,293. p value > α yaitu $0,293 > 0,10$. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, pemerintah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dengan tingkat kepercayaan 90%. Hal tersebut berarti, semakin baik atau tidaknya peranan pemerintah tidak berpengaruh dengan besarnya tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Pamudji (1992) yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup baik, sebagai dinamisator (memberi bimbingan), katalisator (mendorong laju pembangunan), maupun sebagai pelopor (mengayomi masyarakat) dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan partisipasi penuh dari masyarakat pemerintah juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator (memberi bimbingan), katalisator (mendorong laju pembangunan), maupun sebagai pelopor (mengayomi masyarakat) dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan partisipasi penuh dari masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di Desa Mancasan, pemerintah memiliki peran yang tergolong tinggi atau baik, namun jika dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan pemerintah yang memiliki peran yang baik maupun tidak baik, tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya, yaitu pemerintah sebagai fasilitator pemberi bantuan terbesar untuk program-program pertanian yang digunakan untuk memudahkan kegiatan usaha tani begitu pula untuk program PUPM, namun dana bantuan pemerintah tersebut terkadang tidak memberikan hasil langsung kepada perorangan seperti untuk program PUPM sendiri.

Gapoktan yang merupakan penggerak dari program PUPM diberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah untuk membeli gabah dari petani, menggiling gabah tersebut menjadi beras dan pengemasan produk hingga pemasaran ke Toko Tani Indonesia (TTI). Beberapa kegiatan tersebut juga memiliki biaya yang besar bahkan terkadang gapoktan tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan Toko Tani Indonesia (TTI). Bantuan tersebut memang menarik petani anggota gapoktan untuk ikut serta dalam program PUPM karena jumlahnya yang cukup besar, namun mengingat syarat dari program PUPM yaitu kualitas beras adalah kualitas yang baik sedangkan gabah yang mereka hasilkan tidak selalu dalam kondisi tersebut membuat partisipasi mereka rendah dalam program PUPM atau bisa dikatakan bantuan pemerintah terkait program PUPM kurang memberikan hasil kepada mereka. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya peran pemerintah sebagai fasilitator pemberi bantuan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam mengikuti program PUPM.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik petani anggota gapoktan yang meliputi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yaitu (a) pendidikan non formal tergolong rendah, (b) pendapatan tergolong rendah (berkisar antara 1,5 juta - 3 juta), (c) keaktifan anggota tergolong cukup, (d) luas lahan tergolong sangat sempit ($<0,25$), (e) manajemen kelompok tergolong tinggi (baik) yang terdiri dari kepemimpinan, regulasi dan transparansi, (f) budaya organisasi tergolong baik, (g) peran pemerintah tergolong baik.
2. Partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yaitu (a) partisipasi tahap perencanaan tergolong cukup, (b) partisipasi tahap pelaksanaan tergolong sangat rendah dengan , (c) partisipasi tahap pemanfaatan hasil tergolong cukup, (d) partisipasi tahap evaluasi tergolong rendah, (e) partisipasi secara keseluruhan tergolong cukup.
3. Pengaruh karakteristik petani anggota gapoktan yang meliputi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani anggota gapoktan dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yaitu: (a) pendidikan non formal, pendapatan, keaktifan anggota, luas lahan, manajemen kelompok, budaya organisasi, dan peran pemerintah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi

petani anggota gapoktan; (b) secara parsial dengan model heterokedastisitas, pendidikan non formal, luas lahan, dan budaya organisasi mempunyai pengaruh secara signifikan dengan tingkat kepercayaan 90%, dan pendapatan mempunyai pengaruh secara signifikan dengan tingkat kepercayaan 99% terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM, sedangkan variabel lain seperti keaktifan anggota, manajemen kelompok, peran pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM; (c) pendidikan non formal, pendapatan, manajemen kelompok, dan peran pemerintah mempunyai arah pengaruh yang positif sedangkan keaktifan anggota, luas lahan dan budaya organisasi mempunyai arah pengaruh yang negatif terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan adalah

1. Pemerintah

Pemerintah (BKP) sebaiknya memperhatikan betul setiap kegiatan PUPM dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pengurus gapoktan dengan petani anggota gapoktan. Selain itu pemerintah juga sebaiknya mengkaji ulang terkait dana banper yang diberikan kepada gapoktan karena dana untuk penggilingan dan penjemuran gabah tidak ada.

2. Gapoktan

a. Gapoktan sebaiknya mempunyai mesin *rice milling* sendiri dalam mengolah gabah, karena selama ini *rice milling unit* dan gudang cadangan pangan harus bermitra dengan salah satu warga atau petani anggota gapoktan pengusaha beras. Sehingga petani anggota gapoktan lainnya tidak dapat berpartisipasi secara langsung baik melakukan penggilingan gabah menjadi beras maupun pengemasan produk beras.

- b. Dalam proses pendistribusian produk atau pemasaran, sebaiknya gapoktan memberitahu kapan waktu pendistribusian produk beras sehingga petani anggota gapoktan mampu menyempatkan diri ikut serta dalam proses pendistribusian produk ke Toko Tani Indonesia (TTI)
3. Petani anggota gapoktan
- a. Pendidikan non formal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM. Oleh sebab itu, pendidikan non formal seperti sosialisasi, pembinaan dan pendampingan sebaiknya harus sering diikuti oleh petani agar informasi-informasi terkait program PUPM bisa diterima oleh petani anggota gapoktan.
 - b. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani anggota gapoktan dalam program PUPM namun mempunyai arah pengaruh yang negatif. Terkait hal tersebut, petani anggota gapoktan sebaiknya mencoba untuk memahami tujuan program PUPM sehingga program dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan budaya yang ada pada organisasi kelompok.